



LAPORAN PELAKSANAAN

THE 142ND INTER-PARLIAMENTARY UNION (IPU) ASSEMBLY
“Overcoming the Pandemic Today and Building a Better
Tomorrow: the Role of Parliaments”

Virtual
26 April – 27 Mei 2021



BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



**LAPORAN PELAKSANAAN
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**THE 142ND INTER-PARLIAMENTARY UNION (IPU) ASSEMBLY (VIRTUAL)
“Overcoming the pandemic today and building a better tomorrow: the role of
parliaments / Peran Parlemen Mengatasi pandemi saat ini dan membangun masa
depan yang lebih baik”**

26 April - 27 Mei 2021

I. PENDAHULUAN

Pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, BKSAP DPR RI mengikuti General Debate bagian dari rangkaian Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly ke-142, yang diselenggarakan secara daring. Adapun tema dari Debat Umum dalam General Assembly Meeting adalah; *“Overcoming the pandemic today and building a better tomorrow: the role of Parliaments”*. Pada sesi Debat Umum ini, delegasi Parlemen anggota IPU diperkenankan untuk menyampaikan intervensi selama 2 menit secara bergantian, dimulai dari Speaker / Vice Speaker, dilanjutkan dengan anggota Parlemen berdasarkan *first come basis*. Sebelum penyampaian intervensi pada sesi Debat Umum ini, Delegasi BKSAP DPR RI terlebih dulu mengadakan rapat internal dengan mendengarkan menerima paparan dari Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negera Berkembang Kementerian Luar Negeri, Penny Dewi Herasati mengenai perkembangan isu-isu internasional, khususnya yang menjadi perhatian Indonesia. Selanjutnya Intervensi Delegasi BKSAP DPR RI di General Debate disampaikan oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI yaitu Bapak Dr. Sihar Sitorus (F-PDIP).

A. SUSUNAN DELEGASI

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN	KOMISI
1	Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc (A-88)	F-GERINDRA	Ketua BKSAP	I
2	Dr. Sihar P.H. Sitorus, BSBA, MBA (A-139)	F-PDI-P	Wakil Ketua BKSAP	XI
3	Putu Supadma Rudana (A-563)	F-PD	Wakil Ketua BKSAP	VI
4	Dr. Mardani Ali Sera (A-422)	F-PKS	Wakil Ketua BKSAP	II
5	Gilang Dhielafararez, SH.LL.M (A-179)	F-PDI-P	Anggota BKSAP	III
6	Puteri Anetta Komarudin (A-295)	F-PG	Anggota BKSAP	XI
7	Ir. Kamrussamad (A-79)	F-GERINDRA	Anggota BKSAP	XI
8	Arkanata Akram, S.T., B.E. (Hons) M.Eng.Sc. (A-392)	F-NASDEM	Anggota BKSAP	VII
9	Arzeti Bilbina, SEvc, M.A.P. (A-32)	F-PKB	Anggota BKSAP	IX
10	Didi Irawadi Syamsuddin.SH, LI.M (A-546)	F-PD	Anggota BKSAP	XI
11	Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc (A-517)	F-PAN	Anggota BKSAP	VII

B. VISI DAN MISI DELEGASI

- Mewakili Indonesia dalam persidangan internasional anggota parlemen seluruh dunia.
- Memberikan pandangan/ide Indonesia terkait isu-isu global yang diangkat pada persidangan tersebut.
- Memperjuangkan isu-isu yang terkait dengan kepentingan nasional Indonesia.
- Bertukar pengalaman dengan para anggota parlemen seluruh dunia yang tergabung di dalam (IPU).
- Mengisi jabatan-jabatan strategis di IPU.

C. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Materi yang dijadikan referensi bagi para anggota parlemen yang hadir pada persidangan ini dipersiapkan dan diolah oleh Tenaga Ahli dan Sekretariat KSI BKSAP yang berupa Pidato dan Saran Butir Wicara.

II. ISI LAPORAN

A. AGENDA ACARA

HARI / JAM	KEGIATAN	KETERANGAN
SENIN, 26 APRIL 2021 19.00 - 21.30 WIB	Standing Committee on Peace and International Security Debat: “Overcoming the pandemic today and building a better tomorrow: the role of parliaments”	
RABU, 28 APRIL 2021 19.00 - 21.30 WIB	Standing Committee on Democracy and Human Rights Debat mengenai isu terkait.	
SENIN, 17 MEI 2021 19.00 - 21.30 WIB	Standing Committee on Peace and International Security Mengadopsi resolusi: “Resolution on Parliamentary strategies to strengthen peace and security against threats and conflicts resulting from climate-related disasters and their consequences”	

<p>SELASA, 18 MEI 2021 19.00 - 21.30 WIB</p>	<p>Standing Committee on Sustainable development</p> <p>Mengadopsi resolusi: <i>“Resolution on Mainstreaming digitalization and the circular economy to achieve the SDGs, particularly responsible consumption and production”</i></p>	
<p>SELASA, 18 MEI 2021 19.00 - 21.30 WIB</p>	<p>Standing Committee on Democracy and Human Right</p> <p>Debat tentang: <i>“Legislation worldwide to combat online sexual child Exploitation”</i></p>	
<p>SENIN, 24 MEI 2021 19.00 – 21.00 WIB</p>	<p>Governing Council</p>	<p>Anggota Governing Councili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Fadll Zon • Dr. Sihar Sitorus • Puteri A. Komarudin
<p>SELASA, 25 MEI 2021 19.00 – 21.00 WIB</p>	<p>Governing Council</p>	<p>Anggota Governing Councili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Fadll Zon • Dr. Sihar Sitorus • Puteri A. Komarudin
<p>RABU, 26 MEI 2021 19.00 – 21.00 WIB</p>	<p>Sidang Umum (General Assembly) Inter-Parliamentary Union (IPU)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Debat interaktif dengan tema <i>“Overcoming the pandemic today and building a better</i> 	<p>Seluruh Delegasi</p>

	<i>tomorrow: the role of parliaments”</i> <ul style="list-style-type: none"> • Video messages 	
KAMIS, 27 MEI 2021 19.00 – 21.00 WIB	Sidang Umum (General Assembly) Inter-Parliamentary Union (IPU) <ul style="list-style-type: none"> • Adopsi Resolusi • Laporan oleh Standing Committee • Adopsi outcome document 	Seluruh Delegasi

B. JALANNYA SIDANG

1. VIDEO MESSAGE KETUA DPR RI YANG DIPUBLISH DI WEB IPU

Ketua RI menyatakan sidang kali ini diselenggarakan pada saat yang penting di tengah pandemi. Walaupun vaksin telah diberikan kepada masyarakat, distribusinya belum merata. Pertumbuhan ekonomi global telah menunjukkan perbaikan, walaupun dengan hasil yang berbeda di setiap negara. Terkait hal ini parlemen dapat memainkan peran yang penting dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19.



Dr. Puan Maharani, Ketua DPR RI memberikan pernyataan melalui Video Message pada Sidang IPU Assembly ke-142

Beberapa yang dapat dilakukan oleh Parlemen, antara lain:

- a. Parlemen dapat mendesak negara-negara produsen vaksin untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka, termasuk pendanaan fasilitas COVAX. Di saat seperti inilah kita dapat menunjukkan solidaritas global, di mana negara-negara yang mengalami surplus dapat membantu negara-negara yang membutuhkannya.
- b. Parlemen dapat mendukung implementasi kebijakan fiskal dan moneter yang tepat untuk mencapai pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- c. Parlemen harus memitigasi dampak sosial yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, seperti peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Parlemen juga harus memastikan agenda pemulihan ekonomi responsif terhadap kebutuhan perempuan.
- d. *IPU Assembly* yang diselenggarakan kali ini memberikan kesempatan kepada Parlemen-Parlemen untuk mempercepat pemulihan, dan mendorong tercapainya agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Di akhir pidatonya, Ketua DPR mendorong kerja sama dan kolaborasi global untuk mencapai tatanan dunia yang lebih damai dan sejahtera.

2. ASEAN+3 MEETING (20 April 2021)

Delegasi Hadir:

Cambodia, Thailand, **Indonesia - Puteri Anetta Komaruddin, Anggota BKSAP (F-Golkar)**, Lao PDR, Vietnam.

a. Opening Remarks by Chair Thailand (H.E. Mr. Chuan Leekpai, President of the National Assembly Thailand)

Ketua ASEAN+3 Meeting mengungkapkan dalam sambutannya bahwa upaya yang dilakukan oleh parlemen tidak bisa jika harus menunggu selesainya pandemi COVID-19. Mekanisme pertemuan secara virtual ini merupakan terobosan dan berterima kasih atas upaya yang telah dilakukan Delegasi untuk bertemu dan saling dukung dalam agenda-agenda internasional.

b. Adoption of the Agenda

Agenda disepakati oleh peserta Delegasi.

c. Adoption Minutes of the ASEAN+3 Meeting, 30th October 2020

Pertemuan ASEAN+3 sebelumnya diselenggarakan secara virtual pada 30 Oktober 2020, dengan Singapura sebagai *Chair of the Meeting*. Minutes pertemuan disepakati oleh peserta Delegasi.

d. Nomination of the Drafting Committee for Draft Resolution proposed by Standing Committee on Peace and International Security and Standing Committee on Sustainable Development.

Ketua Rapat menjelaskan bahwa ada dua posisi untuk masing-masing *Geopolitical Group* untuk merancang / *drafting* di setiap komite. Setiap komite harus diisi oleh anggota parlemen dengan perwakilan jender 1 laki-laki dan 1 perempuan.

Dalam pertemuan tidak ada Delegasi yang mengajukan nominasi terkait keanggotaan di *Drafting Committee* terkait.

e. Vacancies di 142nd IPU Assembly

Sedikitnya ada sembilan organ IPU dan 17 posisi tersedia untuk *Asia-Pacific Political Grup (APG)*. Sejumlah posisi harus diisi paling lambat 26 April 2021 dan sebagian besar telah terisi pada 16 Mei 2021.

Deadline 26 April 2021

No	Organ IPU	Kandidasi
1	Bureau of Women MPs (dua MPs perempuan)	Belum ada usulan
2	Board of the Forum of Young MPs (1MP laki-laki dan 1MP perempuan)	<ul style="list-style-type: none">• Mr.Issaara Sereewatthanawut (Thailand)

Deadline 16 Mei 2021

No	Organ IPU	Kandidasi
1	Committee to Promote Respect for IHL (1 dari MP perempuan)	Belum ada usulan
2	High Level Advisory Group on Countering Terrorism and Violence Extremism (1 dari MP laki-laki)	<ul style="list-style-type: none">• Mr. Anusart Suwanmongkol (Thailand)
3	Working Group on Science and Technology (4 posisi dengan 2 MP laki-laki dan 2 MP perempuan)	<ul style="list-style-type: none">• Mr. Kanok Wongtrangan (Thailand)• China (anggota parlemen perempuan)• -• -
4	Bureau of the Standing Committee on Peace and International Security (3 posisi, setidaknya 1 MP perempuan)	Belum ada usulan.

5	Bureau of the Standing Committee on Sustainable Development (1 posisi MP)	Belum ada usulan.
6	Bureau of the Standing Committee on Democracy and Human Rights (2 posisi sedikitnya 1 MP laki-laki)	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Fadli Zon, MP (Indonesia) • Belum ada usulan.
7	Bureau of the Standing Committee on UN Affairs (1 posisi untuk MP perempuan)	Belum ada usulan.

f. Next ASEAN+3 Chair

Sesuai urutan alfabetis, Vietnam menjadi Ketua Rapat ASEAN+3 berikutnya pada pertemuan 143rd IPU Assembly di Kigali, Rwanda. Vietnam mengucapkan terima kasih atas segala kerja sama seluruh pihak dan akan berkomitmen melanjutkan kesuksesan kepemimpinan ASEAN+3 berikutnya.

g. Other Business

Delegasi Thailand mengangkat isu mengenai jadwal pertemuan Asia Pacific Group yang belum diselenggarakan. Staf Parlemen Korea Selatan, sebagai wakil dari Ketua Rapat Grup Asia Pasifik menjadwalkan pertemuan pada awal Mei 2021.

3. STANDING COMMITTEE ON PEACE AND INTERNATIONAL SECURITY (26 April 2021)

Inter-Parliamentary Union (IPU) mengadakan pertemuan daring Standing Committee on Peace and International Security. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda Sidang Umum IPU yang ke-142 (142 IPU Assembly). Adapun tema dari pertemuan adalah “*Overcoming the pandemic today and building a better tomorrow: the role of parliaments*”.

Pada pertemuan daring tersebut, para anggota Parlemen yang hadir diminta untuk berpartisipasi aktif mendiskusikan bagaimana Parlemen dapat berkontribusi pada penanganan krisis, khususnya membangun ketahanan, menangani penyebab krisis, serta menciptakan perdamaian dan mendorong peningkatan kapasitas bagi masyarakat lokal untuk dapat membangun kembali paska terjadinya krisis. Disamping itu juga untuk mengoptimalkan kesempatan dan cara-cara untuk lebih mengutamakan Keamanan Manusia (*Human Security*) ketimbang Keamanan Militer (*Military Security*), terlebih di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini.

Delegasi Hadir: Argentina, Burundi, India, Kanada, Spanyol, Swedia, Thailand, Tiongkok, Uni Emirat Arab.

a. Opening Remark oleh Hon. Mr. Jose Ignacio Echaniz, Anggota Parlemen Spanyol

Jose Ignacio Echaniz membuka pertemuan dengan menjelaskan bahwa sesuai dengan tema diskusi, maka pertemuan Standing Committee on Peace and International Security yang berlangsung secara virtual kali ini, akan mendiskusikan mengenai bagaimana Parlemen dapat berperan aktif dalam mendorong penanganan krisis yang lebih baik lagi, meningkatkan upaya pemulihan kondisi sosial dan ekonomi yang terdampak oleh krisis seperti Pandemi COVID-19, menyusun rencana mitigasi resiko yang lebih baik lagi di masa yang akan datang, serta mendorong legislasi dan peraturan yang lebih mengutamakan Keamanan Manusia (*Human Security*). Di samping itu Parlemen juga diharapkan dapat mendorong para pemangku kepentingan untuk dapat membangun kembali sektor-sektor terdampak oleh krisis untuk lebih baik lagi (*build back better*), jika dibandingkan sebelum krisis terjadi. Jose Ignacio Echaniz kemudian memberikan kesempatan kepada Oscar Fernandez Taranco sebagai keynote speaker untuk memulai paparannya.

b. Hon. Mr. Oscar Fernandez Taranco, United Nations Assistant Secretary-General for Peacebuilding Support

Oscar Fernandez Taranco menjelaskan bahwa konflik kekerasan saat ini telah berkembang menjadi kompleks dan berlarut-larut. Melibatkan lebih banyak kelompok non-negara, aktor regional dan internasional, yang sering dikaitkan dengan tantangan global. Isu yang muncul sangat luas, mulai dari isu perubahan iklim hingga kejahatan transnasional terorganisir. Kondisi demikian diakui sebagai salah satu hambatan utama dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030. Oleh karena itu semua pemangku kepentingan termasuk Parlemen diharapkan dapat mendorong kebijakan di semua tingkatan, dari lokal hingga global, untuk dapat fokus pada pencegahan konflik dan kekerasan secara lebih efektif. Taranco juga menjelaskan pentingnya para pemangku kepentingan termasuk Parlemen untuk melakukan konsolidasi antara *peace building* dengan *human rights* paska terjadinya sebuah krisis atau konflik. Kemudian untuk dapat merealisasikan rencana pembangunan kembali paska krisis atau konflik (*build back better*), langkah yang perlu diperhatikan dan diupayakan oleh semua pihak adalah; menyusun skenario penanganan krisis yang lebih baik, menemukan dan menyelesaikan akar permasalahan pada tiap krisis atau konflik, melakukan langkah-langkah pencegahan dini, serta mencegah dampak yang lebih parah dari sebuah krisis ataupun konflik yang dapat dirasakan oleh manusia. Oleh sebab itu menurutnya Parlemen perlu merumuskan legislasi yang dapat lebih mengakomodir faktor-faktor Keamanan

Manusia (*Human Security*) dalam sebuah kebijakan pembangunan kembali paska terjadinya konflik ataupun krisis.

Taranco juga menjelaskan bahwa pada hakikatnya, perdamaian, keamanan dan hak asasi manusia memiliki keterkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, penting untuk dapat melakukan sinkronisasi kebijakan di antara ketiga faktor tersebut, terutama dalam rangka pelaksanaan mewujudkan perdamaian (*peace building*) dan memelihara perdamaian (*sustaining peace*). PBB pada dasarnya berupaya untuk mendorong agar pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan pembangunan kembali paska terjadinya sebuah krisis atau konflik dapat memperhatikan ketiga faktor tersebut. Untuk membantu merealisasikan hal ini PBB bekerja sama dengan Bank Dunia telah merilis sebuah studi yang berjudul “*Pathways for Peace*”. Studi ini melihat bagaimana proses pembangunan dapat berinteraksi lebih baik dengan diplomasi dan mediasi, keamanan dan juga instrumen lainnya untuk mencegah terjadinya konflik. Kemudian untuk dapat memahami 'apa yang berhasil,' meninjau pengalaman berbagai negara dan lembaga untuk menyoroti elemen-elemen yang telah berkontribusi pada perdamaian.

Dalam studi ini Negara menjadi pemegang tanggung jawab utama untuk pencegahan, tetapi agar efektif, masyarakat sipil, sektor swasta, organisasi regional dan internasional juga harus dilibatkan. Di samping itu juga dipandang perlu untuk meningkatkan partisipasi wanita dan pemuda dalam pengambilan keputusan dan bagaimana menformulasikan kebijakan jangka panjang untuk menampung dan menyalurkan aspirasi wanita dan remaja yang merupakan salah satu hal fundamental dalam mempertahankan perdamaian.

Taranco mengakhiri penjelasannya dengan menegaskan bahwa di era sekarang di mana karakter konflik dan krisis semakin berkembang dan berubah-ubah, menjadi penting untuk melakukan investasi tidak hanya pada Keamanan Militer (*Military Security*), tetapi juga Keamanan Manusia (*Human Security*).

c. Hon. Ms Sara Falaknaz, Anggota Parlemen Uni Emirat Arab

Ms. Falaknaz menyampaikan pendapatnya mengenai topik diskusi. Menurutnya di era pandemi ini memang “Keamanan Manusia” menjadi isu sentral yang harus disikapi dengan tepat oleh Parlemen yang memiliki wewenang dalam perumusan Undang-Undang terkait penanganan pandemi. Oleh karenanya peran Parlemen menjadi semakin penting. Dalam menangani pandemic, negara tidak bisa bergerak sendiri-sendiri sehingga kerja sama internasional menjadi salah satu kunci sukses dalam penanganan pandemi. Namun demikian, sejatinya kerja sama internasional ini penting tidak hanya dalam rangka penanganan pandemi, tetapi juga dalam membantu tewujudnya Keamanan

Pangan (*Food Security*). Sebab di masa krisis Keamanan Pangan menjadi salah satu faktor utama bagi sebuah negara untuk dapat melewati krisis dan membangun kembali dengan lebih baik lagi.

Anggota Parlemen dari UAE ini juga berbicara tentang upaya yang dilakukan di bidang pemberdayaan perempuan dan pemuda di berbagai lapisan masyarakat dan menyoroti nilai-nilai hidup berdampingan secara damai, toleransi dan persaudaraan yang berlaku di UAE. Kemudian juga dibahas upaya internasional UAE untuk membantu negara-negara sahabat dalam rangka memerangi pandemi COVID-19. UAE telah mengirim lebih dari 1.700 ton bantuan medis dan peralatan perlindungan pribadi ke lebih dari 1,7 juta tenaga profesional kesehatan di seluruh dunia selain tentunya bantuan makanan.

d. Hon. Mr. Jorge Taiana, Anggota Parlemen Argentina

Jorge Taiana anggota Parlemen dari Argentina menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat dioptimalkan oleh parlemen dalam situasi pandemi ini. Pertama adalah memfasilitasi penguatan sistem kesehatan dalam rangka menghadapi pandemi. Kedua memastikan bahwa kerja sama internasional berjalan dengan baik khususnya dalam upaya menangani pandemi. Kemudian yang juga menjadi krusial adalah memastikan akses yang setara terhadap ketersediaan vaksin. Akses kepada vaksin harus setara untuk semua negara tanpa melihat apakah negara besar ataupun kecil. Kerja Sama Internasional harus bisa diarahkan untuk memastikan ketersediaan vaksin bagi semua.

e. Hon. Ms. Cecilia Widegreen, Anggota Parlemen Swedia

Cecilia Widegreen menyampaikan bahwa saat ini adalah saat dimana anggota Parlemen sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Terutama dalam menyusun Legislasi yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19. Di samping itu, Parlemen melalui diplomasinya juga bisa berperan secara strategis dalam mendorong kerja sama multilateral yang lebih erat lagi. Mengingat bahwa di masa krisis ini, kerja sama menjadi sangat penting tidak hanya ketika berbicara mengenai penanganan COVID-19, tetapi juga berdialog dalam rangka mengatasi tantangan-tantangan terhadap perdamaian dan keamanan di masa pandemi. Tantangan tersebut semakin beragam dan semakin kompleks. Anggota Parlemen sesungguhnya memiliki '*common ground*' dalam membangun kerja sama, yaitu merepresentasikan rakyat dan membangun harapan serta masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, Parlemen di seluruh dunia hendaknya membangun kerja sama yang baik.

f. Hon. Ms. Poonamben Maadam, Anggota Parlemen India

Maadam Poonamben menjelaskan mengenai peran Parlemen yang semakin penting terutama pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Sebagai

demokrasi terbesar di dunia, Parlemen India (Lok Sabha) telah menyusun berbagai legislasi terkait COVID-19 antara lain Undang-Undang yang mengusulkan perlindungan tenaga kesehatan yang bekerja di garis terdepan dalam menangani COVID-19. Parlemen India juga fokus mendorong pengembangan teknologi kesehatan sehingga India dapat menghadapi pandemi dengan cara yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Parlemen India juga mendorong pemerintahnya untuk memastikan bahwa ketersediaan vaksin buatan India, COVID Shield untuk dipergunakan di dalam negeri memadai.

g. Hon. Ms. Denise Ndadaye, Anggota Parlemen Burundi

Ms. Denise Ndadaye menyampaikan bahwa peran Parlemen juga penting untuk membantu membangun kesadaran publik akan perlunya kewaspadaan terhadap penyakit ini. Parlemen dapat mendorong Undang-Undang yang dapat mendorong kebijakan yang lebih tepat dalam menangani pandemi serta Parlemen juga dapat berperan penting dalam kampanye pentingnya vaksin sekaligus membagikan informasi yang benar terkait vaksin ke masyarakat. Lebih jauh, anggota Parlemen dari Afrika ini juga menjelaskan bagaimana saat ini COVID-19 berdampak kepada tertundanya sejumlah agenda reformasi politik di Afrika. Sehingga dipandang sangat perlu untuk pihak yang berkuasa membangun kerja sama dengan pihak oposisi, dalam rangka untuk merespon dampak dari COVID-19.

h. Hon. Ms. Heather McPherson, Anggota Parlemen Kanada

Heather Mc Pherson mendorong kepada anggota Parlemen seluruh dunia untuk dapat lebih terlibat dengan para konstituennya guna memberikan pemahaman sejauh mana Pandemi COVID-19 ini berdampak kepada konstituen dan juga dunia. Tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Parlemen Kanada telah membentuk sebuah komisi khusus untuk mengkaji dan mempelajari sejauh mana COVID-19 akan membawa pengaruh pada lanskap keamanan global dan telah merumuskan sepuluh rekomendasi berisikan anjuran respon global terhadap pandemi tersebut.

Parlemen Kanada juga telah menyusun beberapa Undang-Undang yang memberikan kewenangan lebih bagi pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya dalam penanganan COVID-19. Undang-Undang tersebut antara lain adalah: *Act to amend the Financial Administration Act, COVID-19 Emergency Response Act, Act relating to certain measures in response to COVID-19 serta Act respecting further COVID-19 measures*. Kemudian yang perlu menjadi perhatian dari Parlemen seluruh dunia adalah mengenai ketersediaan vaksin secara global, serta perlunya untuk memberlakukan pengabaian sementara terhadap rezim perdagangan global seperti *Trade-Related Aspects of*

Intellectual Property Rights (TRIPS), guna memastikan akses yang setara bagi semua negara untuk mendapatkan vaksin.

i. Hon. Mr. Anusart Suwanmongkol, Anggota Parlemen Thailand

Anusart Suwanmongkol menyampaikan bahwa Parlemen Thailand saat ini sedang melakukan kajian untuk mempertimbangkan aspek tantangan modern bagi keamanan seperti pandemi COVID-19, terhadap Keamanan Manusia (*Human Security*). Hal ini bisa melahirkan perspektif baru mengenai bagaimana kita memandang COVID-19 dan menggalang upaya bersama untuk menanganinya. Di samping itu juga penting untuk membangun kapabilitas peringatan dini bagi ancaman keamanan semacam ini.

j. Hon. Dr. Lizhong Dai, Anggota Parlemen Tiongkok

Dr. Lizhong Dai menekankan bahwa di masa krisis seperti hari ini, kerja sama dan solidaritas merupakan senjata terkuat. Oleh karena itu, Tiongkok meneguhkan komitmennya dalam memberikan bantuan bagi negara-negara sahabat dalam rangka menghadapi Pandemi COVID-19. Di samping itu, ditegaskan bahwa keberhasilan Tiongkok dalam menangani COVID-19 adalah melalui empat strategi awal, yaitu; penemuan kasus infeksi, pelaporan, penanganan serta pemberlakuan isolasi. Pada saat-saat di mana kerja sama sangat dibutuhkan seperti hari ini,

k. Kesimpulan Standing Committee On Peace And International Security (26 April)

- Mayoritas anggota Parlemen yang hadir secara tidak langsung sepakat bahwa Pandemi COVID-19 ini telah memberikan gambaran baru mengenai tantangan bagi Keamanan Manusia yang ke depan akan lebih banyak dihadapi ketimbang Keamanan Militer. Oleh karena itu, investasi ataupun anggaran yang cukup juga perlu di alokasikan tidak hanya untuk Keamanan Militer, tetapi juga untuk Keamanan Manusia.
- Parlemen perlu secara konsisten menyuarakan pentingnya akses yang setara kepada ketersediaan vaksin dan untuk mendorong kerja sama multilateral dalam penanganan COVID-19.
- Secara substansi isu-isu yang di diskusikan pada pertemuan *Standing Committee on Peace and International Security* ini (seperti akses setara terhadap vaksin, pengabaian *TRIPS*, *Human Security*) juga telah menjadi perhatian dari BKSAP DPR RI dan telah juga di suarkan dan di perjuangkan pada forum-forum Parlemen lainnya.

4. STANDING COMMITTEE ON DEMOCRACY AND HUMAN RIGHT (28 April 2021)

Delegasi Hadir: Bahrain, UAE, Iran, Burundi, Cina, Swiss, Yaman, Turki, Argentina, Kanada, Benin, Aljazair, Siprus, Meksiko, Zimbabwe, dan Thailand.

a. Opening Remark oleh Hon. Ms. Arda Gerkens, Anggota Senat Kerajaan Belanda.

Ketua rapat membuka persidangan dan memberikan paparan terkait isu yang akan diangkat pada sesi ini, yaitu: *The Impact of Pandemic on Democracy and Human Rights dan the Impact of the Pandemic on Parliament*. Hal ini penting diangkat karena pandemi yang telah terjadi selama setahun ini telah banyak merubah pola kerja dan membatasi fungsi parlemen di seluruh dunia, khususnya dalam hal fungsi parlemen dalam mengawal perlindungan Hak Asasi Manusia masyarakat. Seperti yang kita ketahui, di beberapa negara telah terjadi penguatan kewenangan eksekutif dengan alasan penanganan pandemi yang lebih efektif. Hal ini rawan disalah gunakan untuk membatasi demokrasi dan hak asasi manusia. Parlemen harus memperkuat fungsi pengawasannya untuk membatasi kecenderungan penyalahgunaan ini.

b. Ms. Laura Thornton, Director for Global Programmes of International IDEA

Paparan pada kesempatan ini memberikan beberapa data menarik terkait dampak pandemi pada pemerintahan dan demokrasi berdasarkan kajian yang telah diselenggarakan selama setahun belakang. Beberapa bentuk penyalahgunaan yang dapat terjadi antara lain: penggunaan dalih kedaruratan, marginalisasi beberapa kelompok minoritas, pemilu dan persaingan politik yang tidak transparan, serta menurunnya integritas informasi oleh media.

Dari 162 negara yang diobservasi, terdapat 96 negara atau 59% yang telah menyatakan status kedaruratan nasional sejak pandemi merebak. Negara-negara tersebut dapat dikategorikan menjadi negara demokrasi, hybrid, dan otoriter. Dari seluruh negara yang mengumumkan kedaruratan nasional tersebut, sebanyak 72% dapat dikategorikan sebagai negara demokrasi.

Sebanyak 73 negara telah memberlakukan pembatasan kebebasan berekspresi selama pandemi. Dalam upaya pembatasan ini, banyak negara telah menggunakan kekuatan kepolisian secara sewenang-wenang dan 32 negara bahkan melibatkan militer untuk melakukan tugas tersebut.

Beberapa pemilu yang sedianya diselenggarakan pada tahun 2020, juga ditunda pelaksanaannya dengan alasan pandemi. Pandemi juga sangat berdampak terhadap pencapaian kesetaraan jender, di mana perempuan merupakan salah satu yang paling terdampak akibat pandemi ini.

Di samping potensi masalah yang muncul, pandemi juga memberikan dampak positif terhadap demokrasi, seperti inovasi dalam pemilu dan digitalisasi parlemen.

c. Mr. Andy Williamson, Digital Parliament and Participation Expert for Inter-Parliamentary Union (IPU)

Paparan ini menekankan agar parlemen menjadi institusi yang berperan dalam menjaga demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Upaya ini dapat dimaksimalkan dengan menjaga komunikasi yang efektif dengan pemerintah. IPU telah berusaha untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi dan Hak Asasi Manusia di kala pandemi.

Pada sesi ini dia Mr. Williamson juga menekankan bahwa secara umum pandemi merubah secara drastic mekanisme kerja parlemen seperti akselerasi modernisasi parlemen yang semakin fleksibel dan dinamis. Salah satu hal yang bisa didorong adalah digitalisasi parlemen, dimana banyak parlemen yang tertinggal terkait hal ini.

5. ASIA PACIFIC GROUP (APG) MEETING (7 Mei 2021)

Delegasi Hadir: 40 MPs dari 12 negara. Indonesia diwakili oleh Dr. Fadli Zon, MP dan Putri Anetta Komaruddin, MP.

a. Opening Remarks by Chair Republic of Korea (Hon. Mrs. Nam In Soon)

Ketua APG Meeting mengungkapkan pentingnya bekerja bersama dalam mengatasi berbagai krisis yang terjadi saat ini. Apabila hal tersebut dilakukan, pandemi COVID-19 hanya akan menjadi pelajaran masa lalu. Ia mengharapkan seluruh negara APG untuk cepat pulih dan pertemuan kali ini berjalan lancar.

b. Adoption of the Agenda

Agenda disepakati oleh peserta Delegasi.

c. Adoption Minutes of the APG Meeting, 30th October 2020

Pertemuan APG sebelumnya diselenggarakan secara virtual pada 30 Oktober 2020. Laporan pertemuan sebelumnya tersebut disepakati oleh seluruh peserta Delegasi.

d. Report by the ASEAN+3 Meeting Group

Ketua ASEAN+3 Group, **H.E. Chuan Leek Pai** menyampaikan hasil dan kesepakatan yang disetujui di pertemuan kawasan tersebut.

e. Report by the APG Representatives in the IPU Executive Committee (China, Pakistan, Thailand)

Ms. P Kraikish dari Thailand sebagai anggota menyampaikan sejak 30 Oktober 2020 hingga saat ini sejumlah kegiatan telah dilakukan oleh IPU Executive Committee. Sejumlah kegiatan di antaranya adalah melakukan pengkajian dan mempertimbangkan versi revisi dari IPU Strategy 2022-2026. Strategi IPU tersebut memiliki dua fase, yakni fase pengkajian dan fase revisi. Executive Committee menyiapkan dan mengkoordinasikan Strategi IPU agar dapat berjalan sesuai jadwal. Diharapkan agar sub-komite keuangan dari Executive Committee dapat mulai bekerja untuk mengkaji rencana aksi strategis tersebut untuk persetujuan seluruh anggota IPU pada Kigali Assembly (143rd IPU Assembly) yang akan diselenggarakan pada akhir tahun 2021.

IPU Executive Committee juga mengkaji strategi komunikasi IPU. Berdasarkan kajian, telah ada perkembangan tetapi masih ada ruang untuk peningkatan. Salah satu upayanya adalah dengan memberikan akreditasi kepada jurnalis politik terkemuka untuk mengikuti pertemuan-pertemuan IPU.

Dalam hal perluasan keanggotaan, IPU menargetkan untuk meraih dua anggota pendiri, yakni Amerika Serikat dan Liberia. Namun saat ini, situasi politik di Liberia tidak begitu menguntungkan. IPU mengharapkan anggota parlemen lainnya untuk juga berinteraksi dengan Kongres Amerika Serikat terkait keanggotaan di IPU. Keanggotaan sejumlah negara seperti Venezuela, Myanmar akan jadi pertimbangan pada Assembly kali ini karena situasi politik domestik yang berkembang.

f. Vacancies to be filled during the Assembly

Sedikitnya ada sembilan organ IPU dan 17 posisi tersedia untuk Grup Geopolitik Asia Pasifik. Sejumlah posisi harus diisi paling lambat 26 April 2021 dan sebagian besar diisi pada 16 Mei 2021.

DPR RI mengajukan pengisian untuk setidaknya tiga posisi, yakni: *Bureau of the Standing Committee on Democracy and Human Rights* (Dr. Fadli Zon), *Bureau of the Standing Committee on UN Affairs* (Andi Yuliani Paris), dan *Bureau of Women MPs* (Putri Anetta Komaruddin).

IPU membutuhkan sedikitnya dua posisi dengan setidaknya 1 anggota parlemen laki-laki untuk *Bureau of the Standing Committee on Democracy and Human Rights*. Dalam pertemuan, Parlemen Australia dan Parlemen Maladewa mengajukan kandidat masing-masing Mr. Julian Hill dan Mrs. Jeehan Mahmod. Sehingga memerlukan pembahasan voting. Namun, Mr. Julian Hill dalam pertemuan menyampaikan dukungannya untuk kandidasi Dr. Fadli Zon dan menyatakan mundur dari pencalonan. Dr. Fadli Zon menyampaikan terima kasih

atas dukungan dari Mr. Julian Hill dalam pengisian posisi tersebut. Dengan demikian, posisi *Bureau of the Standing Committee for Democracy and Human Rights* diisi oleh Dr. Fadli Zon (Indonesia) dan Mrs. Jeehan Mahmud (Maladewa).

Dalam posisi *Bureau of Women MPs*, Indonesia dipastikan terpilih sebagai wakil APG dalam keanggotaan tersebut. Mrs. Putri Anetta Komaruddin akan mewakili APG.

Sementara dalam keanggotaan *Bureau of the Standing Committee on UN Affairs*, pengajuan kandidasi untuk Mrs. Andi Yuliani Paris harus bersaing dengan kandidat asal India, yakni untuk berebut satu posisi wakil dari APG. Namun, dengan semangat konsolidasi dan juga DPR RI pernah mengisi posisi tersebut pada periode DPR sebelumnya, maka, kandidasi Mrs. Andi Yuliani Paris berpindah ke *Bureau of the Standing Committee on Peace and International Security*. Kandidasi Mrs. Andi Yuliani Paris mewakili APG di posisi tersebut dipastikan lolos.

Pada 18 Mei 2021, Delegasi APG juga melakukan voting daring untuk memilih satu posisi dalam *IPU High Level Advisory Group on Countering Terrorism and Violent Extremism*, mengingat ada dua kandidat untuk posisi tersebut yakni Mr. Anusart Suwanmongkol (Thailand) dan Mr. Mojtaba Rezakhah (Iran). Hasil voting menyepakati Mr. Anusart Suwanmongkol sebagai wakil APG di posisi tersebut.

Posisi-posisi yang terisi lebih lanjut sebagai berikut (perlu dikonfirmasi nama-namanya):

No	Organ IPU	Nama
1	Bureau of Women MPs (dua MP perempuan)	• Mrs. Putri Anetta Komaruddin, MP (Indonesia).
2	Board of the Forum of Young MPs (1 MP laki-laki dan 1MP perempuan)	• Mr.Issaara Sereewatthanawut (Thailand)

No	Organ IPU	Kandidasi
1	Committee to Promote Respect for IHL (1 dari MP perempuan)	
2	High Level Advisory Group on Countering Terrorism	• Mr. Anusart Suwanmongkol (Thailand)

	and Violence Extremism (1 dari MP laki-laki)	
3	Working Group on Science and Technology (4 posisi dengan 2 MP laki-laki dan 2 MP perempuan)	<ul style="list-style-type: none"> • Mr. Kanok Wongtrangan (Thailand). • Mr. Jayadev Galla (India). • Ms. Tong Yi (China)
4	Bureau of the Standing Committee on Peace and International Security (3 posisi, setidaknya 1 MP perempuan)	<ul style="list-style-type: none"> • Mrs. Andi Yuliani Paris (Indonesia).
5	Bureau of the Standing Committee on Sustainable Development (1 posisi MP)	
6	Bureau of the Standing Committee on Democracy and Human Rights (2 posisi sedikitnya 1 MP laki-laki)	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Fadli Zon, MP (Indonesia). • Mrs. Jeehan Mahmud (Maladewa).
7	Bureau of the Standing Committee on UN Affairs (1 posisi untuk MP perempuan)	

g. Any Other Business

Dalam kesempatan tersebut, anggota Parlemen dari Kanada dan Kamboja menyampaikan informasi mengenai nominasi mereka atas nama perorangan untuk menjadi anggota *Committee on the Human Rights of Parliamentarians*. Voting akan kandidasi tersebut dilakukan pada pelaksanaan *IPU Governing Council*, secara virtual.

6. STANDING COMMITTEE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF IPU (18 Mei 2021)

Delegasi Hadir: Kanada, India, Tiongkok, Perancis, Swedia, Belanda, dan Burundi

a. Opening Remarks oleh V. Muzenda Tsitsi, Anggota Parlemen Zimbabwe

Pemimpin sidang membuka sidang yang bertujuan untuk mengadopsi resolusi bertema *“Mainstreaming digitalization and the circular economy to achieve the SDGs, particularly responsible consumption and production”*. Pada persidangan ini juga disepakati catatan resume dari sesi yang diadakan pada Oktober 2019

di Belgrade, Serbia. Pemimpin sidang menyampaikan bahwa setelah menerima amandemen dari 12 negara termasuk Indonesia, resolusi tersebut pada akhirnya bisa diadopsi.

b. Jalannya persidangan dan adopsi Resolusi.

Pada prinsipnya, resolusi yang sudah diadopsi tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari delegasi yang hadir. Hanya saja masih terdapat beberapa masukan dan pandangan terkait diadopsinya resolusi tersebut.

- Parlemen seluruh dunia harus mengawal resolusi tersebut secara global.
- Mengingatkan kembali dampak pandemic terhadap capaian kesetaraan jender dan pengurangan kemiskinan. Pandemi telah menunjukkan kedalaman ketidaksetaraan ekonomi dan sosial.
- Mengingatkan tantangan yang muncul dari digitalisasi dan circular economy terhadap perlindungan privasi, hak asasi manusia, kebebasan, dan keamanan dunia maya.
- Menekankan ketidaksetaraan yang ada terkait akses ke platform digital dan internet karena pandemi Covid-19 yang dapat merusak partisipasi masyarakat terutama populasi rentan dan marjinal, seperti perempuan, masyarakat adat, komunitas ras tertentu, penyandang disabilitas, dalam tranformasi menuju ekonomi digital.

c. Perumusan strategi 5 tahunan IPU

Pada kesempatan ini Sekretariat IPU memaparkan hal terkait perumusan strategi 5 tahunan IPU. Saat ini IPU tengah merumuskan strategi untuk 5 tahun ke depan dan delegasi parlemen dapat memberikan masukan pada sesi konsultasi yang akan diadakan secara virtual pada 19 Mei 2021.

7. GOVERNING COUNCIL OF THE IPU (24 – 25 Mei 2021)

Mr. Duarte Pacheco, President of the IPU membuka persidangan *Governing Council* dan menyambut seluruh anggota yang terdiri atas perwakilan parlemen anggota IPU. Pada persidangan kali ini anggota *Governing Council* diwakili oleh tiga orang untuk setiap negara yang mempertimbangkan keseimbangan jender sebagai bentuk komitmen IPU pada pengarus-utamaan kesetaraan jender dalam pengambilan keputusan.

Mr. Pacheco menyatakan bahwa walaupun keputusan akhir *Excecutive Committee* adalah mengadakan seluruh persidangan secara virtual, di tengah keterbatasan akibat Pandemi Covid-19, pada dasarnya dia condong pada pelaksanaan secara

tatap muka. Hal ini karena dengan metode tersebut, para anggota parlemen dapat lebih leluasa dalam mengekspresikan pendapat maupun ide-ide mereka, di samping kendala teknis lainnya seperti keterbatasan waktu yang dengan sangat terpaksa diterapkan pada persidangan virtual. Berbagai isu akan dibahas pada pertemuan kali, seperti kondisi aktual, anggaran, maupun rencana IPU ke depan.

Mr. Martin Chungong, Sekretaris-Jenderal IPU menyambut seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Pertemuan ini diselenggarakan untuk membahas berbagai agenda yang akan dilaksanakan oleh IPU ke depan. Untuk mensukseskan hal ini Sekretariat IPU telah bekerja sama dengan *Working Group* dalam merumuskan teknis penyelenggaraan acara ini. Berbagai penyesuaian harus dilakukan karena perubahan dunia akibat Covid-19 yang telah membatasi tugas dan peran parlemen.

Perubahan tata tertib juga telah diadopsi untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi dan Sekretariat telah menyampaikan kepada *Governing Council* mengenai rancangan tata tertib yang telah disesuaikan tersebut. Terkait teknis Persidangan akan mempergunakan platform digital yang dapat diakses seluas mungkin oleh seluruh parlemen. Seperti yang telah diketahui, beberapa platform digital telah ditolak penggunaannya oleh beberapa negara karena alasan keamanan, sehingga Sekretariat IPU perlu mengakomodasi hal tersebut.

a. Adopsi Agenda

Tidak ada keberatan terhadap rancangan agenda yang telah disirkulasi kepada seluruh parlemen anggota IPU. Oleh karena itu agenda diadopsi dan dinyatakan sah oleh Presiden IPU.

b. Adopsi Tata Tertib Khusus sesi virtual Sidang dan Standing Committee

Tata Tertib Khusus telah disiapkan oleh *Working Group* yang ditugaskan untuk menyiapkan sesi virtual Sidang, didukung oleh Sekretariat IPU dan Penasihat Hukum independen, serta disetujui oleh *Executive Committee*. Tata Tertib dirancang untuk mengadaptasi beberapa Peraturan yang sudah ada, yang akan ditangguhkan pemberlakuannya untuk sementara waktu menimbang sifat sesi virtual yang berbeda. Tata Tertib Khusus diedarkan sebelum kegiatan berlangsung kepada semua anggota IPU dan akan disahkan secara resmi pada pertemuan pertama sesi virtual.

Seluruh delegasi tidak mengajukan keberatan terhadap rancangan tata tertib yang baru tersebut, dan karena itu rancangan tata tertib dapat diadopsi.

c. Persetujuan atas risalah sesi Governing Council ke-206

Risalah pertemuan *Governing Council* sebelumnya telah diedarkan kepada seluruh anggota pada 18 Januari 2021 dan tersedia pada situs IPU

www.ipu.org/event/extraordinary-session-ipu-governing-council#event-sub-page documents.

d. Visi Presiden IPU dan laporan kegiatan sejak sesi Governing Council yang ke-206

Mr. Duerte Pacheco memaparkan visinya mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh IPU. Dia menyatakan akan fokus pada kerja sama dan kolaborasi dari seluruh anggota parlemen, karena di tengah berbagai tantangan, kerja sama akan menjadikan kita kuat. Dengan bekerja sama, IPU dapat menyusun berbagai program dan menghasilkan sesuatu yang relevan dengan kebutuhan dewasa ini. IPU perlu melakukan revisi terhadap berbagai strateginya, termasuk penguatan peran perempuan dan pemuda dalam pengambilan keputusan. IPU harus menjadi organisasi internasional yang inklusif dan dapat memperkuat demokrasi dan parlemen di seluruh dunia.

Sejak terpilih sebagai Presiden IPU pada tahun 2020, Mr. Pacheco telah melaksanakan 61 pertemuan dan 6 kunjungan resmi sebagai upaya mewujudkan visinya atas organisasi ini. Beberapa pertemuan tersebut dilakukan untuk melakukan konsolidasi prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik (*Good Governance*) dan relevansinya bagi organisasi. Pertemuan tersebut diselenggarakan dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Sekretariat, para pimpinan organ-organ IPU, maupun Grup Regional IPU.

Pertemuan lainnya diselenggarakan terkait dengan penguatan peran IPU sebagai salah satu aktor penting dalam politik Internasional. Pertemuan tersebut dilakukan dengan berbagai parlemen nasional, maupun organisasi parlemen regional. Beberapa inisiatif telah dilakukan untuk memperkuat peran parlemen, di antaranya adalah mengajukan ide terkait pemberian *Cremer-Passy Prize*.

Prinsip ketiga adalah memperkuat nilai-nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia di seluruh belahan dunia. Penguatan kedua nilai dasar ini memerlukan komitmen dan kerja sama seluruh pihak di berbagai belahan dunia. IPU juga telah mendorong dialog di antara berbagai kelompok politik yang berseberangan untuk mencari penyelesaian konflik melalui jalan politik yang demokratis. Hal ini merupakan bentuk komitmen IPU pada demokrasi.

Penguatan peran multi-gender dan pemuda dalam aksi politik merupakan fokus keempat Presiden IPU. Inklusi berbagai pihak yang selama ini relatif terpinggirkan akan mendorong lebih banyak inisiatif dan inovasi dalam mencari solusi terhadap permasalahan bersama.

Promosi keanggotaan universal IPU merupakan salah satu fokus Presiden IPU periode ini. Seperti yang kita ketahui, bahwa parlemen salah satu negara paling

berpengaruh di dunia, yaitu Kongres Amerika Serikat tidak tergabung ke dalam IPU. Hal ini sedikit banyak membatasi pengaruh IPU dalam percaturan pengaruh politik dunia. Diharapkan dengan bergabungnya Kongres Amerika Serikat ke dalam IPU dapat memperbaiki situasi ini. Sekretariat IPU telah berupaya banyak dalam mempromosikan agar Kongres Amerika Serikat bergabung. Di antara yang telah dilakukan adalah bekerja sama dengan Grup Regional IPU seperti Twelve Plus Grup, yang mewakili parlemen negara-negara Eropa dan Amerika Utara.

e. Laporan Tahunan IPU dari Sekretaris Jenderal mengenai kegiatan-kegiatan IPU tahun 2020

Governing Council akan menerima informasi terbaru tentang implementasi Strategi tahun 2017-2021. *Governing Council* juga akan menerima gambaran umum tentang status kemitraan strategis antara IPU dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

f. Pemilihan Komite Executive dan Badan-Badan IPU lainnya

Governing Council akan memilih satu anggota untuk menggantikan Mr. A. Abdel Aal (Mesir), yang jabatannya akan berakhir pada sesi ke-2017 *Governing Council*– posisinya akan diteruskan oleh satu orang lelaki atau perempuan dari Arab Group.

Governing Council juga akan diminta memilih enam anggota *Committee on the Human Rights of Parliamentarians* dan dua anggota *Committee on Middle East Questions*. Para anggota dari kedua *Committee* ini dipilih atas nama pribadi dan atas dasar pengetahuan dan pengalaman mereka di masing-masing bidang terkait. *Governing Council* akan mengesahkan pencalonan dari *Geopolitical Groups of MPs* untuk mengisi berbagai posisi kosong di badan-badan di bawah *Governing Council*.

Delegasi Indonesia mendukung pemilihan anggota pengganti Mr. A. Abdel Aal (Mesir)

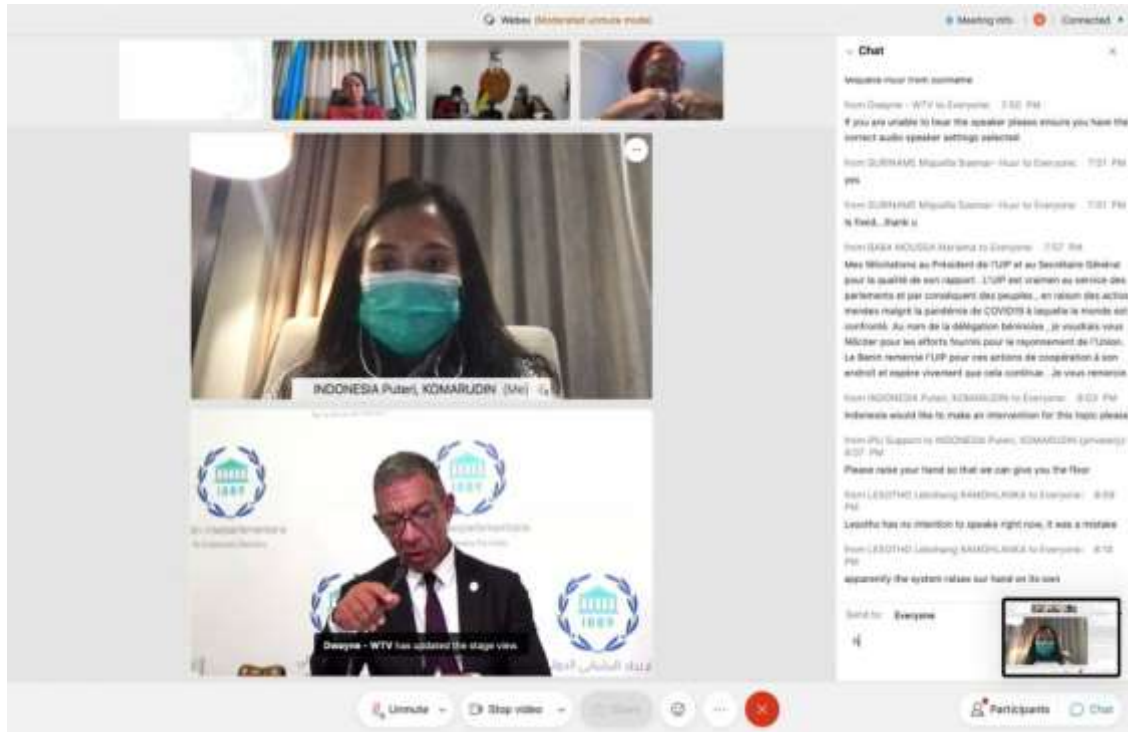
g. Laporan Keuangan tahun 2020

Indonesia tidak mengajukan keberatan terhadap laporan keuangan tahun 2020 tersebut.

h. Pertemuan-pertemuan antar-parlemen di masa mendatang

Pertemuan General Assembly IPU ke-143 yang telah disetujui akan diselenggarakan di Kigali, Rwanda pada 6 – 10 November 2021. Sementara Sidang ke-144 IPU Assembly akan diselenggarakan di Bali, Indonesia pada tahun 2022.

Puteri Annetta Komarudin, Anggota BKSAP DPR RI (F-Golkar) yang mewakili Delegasi Indonesia berpandangan bahwa pertemuan secara hybrid dapat dipertimbangkan sebagai pilihan pertemuan-pertemuan IPU di masa mendatang. Walaupun kita masih fokus pada pertemuan secara online, pertemuan akan lebih efektif jika dilakukan secara tatap muka, karena akan mendorong interaksi dan diskusi di antara para anggota parlemen.

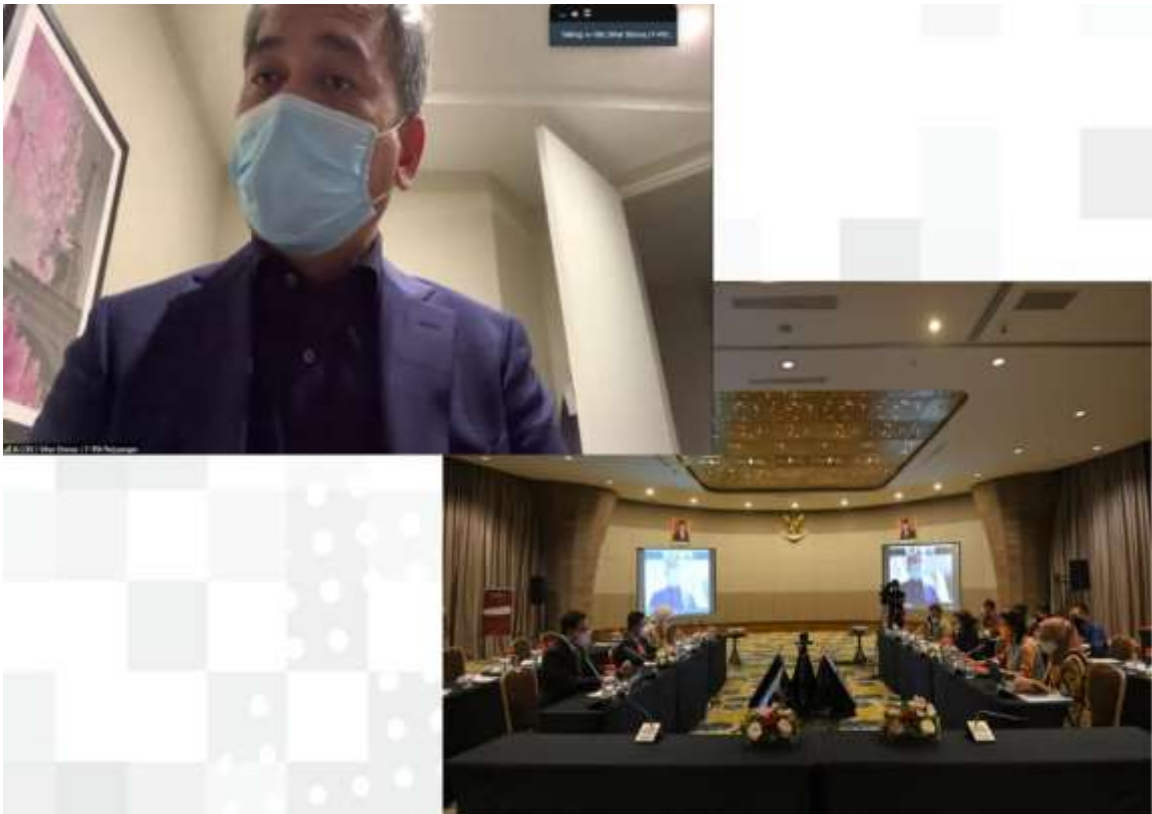


Puteri Annetta Komarudin (F-Golkar) memberikan intervensinya terkait pelaksanaan persidangan IPU ke depannya.

i. Hal – hal lain

8. GENERAL DEBATE

Dr. Sihar Sitorus, Wakil Ketua BKSAP, sebelumnya membuka pertemuan dengan menjelaskan mengenai agenda yang secara keseluruhan terbagi menjadi dua bagian, yaitu presentasi mengenai perkembangan isu-isu terkini dari Kementerian Luar Negeri, dan Penyampaian intervensi Delegasi BKSAP DPR RI pada sesi Debat Umum di Sidang IPU yang ke 142 secara daring. Setelah membuka pertemuan dan memberikan sedikit penjelasan, Wakil Ketua BKSAP mempersilahkan Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri, Penny Dewi Herasati untuk memulai paparannya.



Dr. Sihar Sitorus, Wakil Ketua BKSAP membuka persidangan

Penny Dewi Herasati, Direktur OINB, Kementerian Luar Negeri menjelaskan bahwa ada tiga isu internasional utama yang saat ini menjadi perhatian Indonesia, dalam hal ini yang dipantau perkembangannya oleh Kementerian Luar Negeri. Pertama adalah isu Palestina, kedua adalah perkembangan terkini di Myanmar khususnya setelah pengambil alihan kekuasaan oleh militer dari pemerintahan yang sah, ketiga adalah mengenai vaksin COVID-19.



**Penny Dewi Herasati, Direktur OINB, Kementerian Luar Negeri
memberikan paparan terkait isu internasional actual**

Mengenai isu Palestina, disampaikan bahwa Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara (*two state solution*). Hasil akhir yang diharapkan adalah lahirnya dua negara yang hidup damai berdampingan, yaitu negara Palestina dan negara Israel. Konsistensi Indonesia dalam mendukung Palestina selama ini berupaya diperjuangkan oleh Kementerian Luar Negeri melalui diplomasi internasional. Sedangkan terkait dengan konflik yang baru saja terjadi antara Israel dan Palestina pasca terjadinya kerusuhan di area kompleks Mesjid Al Aqsa, Kementerian Luar Negeri secara aktif memperjuangkan melalui Organisasi Konferensi Islam (OKI). Beberapa hal yang telah dilakukan, antara lain melalui Pertemuan Luar Biasa secara virtual oleh Komite Eksekutif Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada tingkat Menteri Luar Negeri, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2021. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa poin penting melalui pernyataan bersama para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota OKI. Poin-poin penting tersebut antara lain; Mengutuk serangan yang diluncurkan oleh Israel terhadap rakyat Palestina, tanah mereka, dan situs suci. Menuntut penghentian menyeluruh dan segera dari serangan yang mempengaruhi warga sipil dan tidak bersalah, serta harta benda mereka.

Selain melalui OKI, Indonesia juga memperjuangkan isu Palestina melalui Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke-67 dimana Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mendesak penghentian kekerasan yang terjadi di wilayah Palestina dan menekankan hak warga Palestina untuk dapat merdeka. Selain itu, mendorong PBB untuk segera menghentikan kekerasan dan menuntut adanya gencatan senjata serta memastikan agar konflik di Palestina tidak kembali terulang di masa depan. Terlaksananya pembahasan mengenai Palestina di Sidang Umum PBB yang ke-67 ini juga merupakan buah dari pernyataan bersama tiga kepala negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam pada 16 Mei 2021. Dalam pernyataan bersama itu, ketiga negara menekankan beberapa hal, yaitu menyerukan penghentian serangan ke rakyat sipil dan mendesak seluruh pihak untuk menerima *temporary international presence* di Yerusalem. Kemudian mendesak organ PBB, termasuk Dewan Keamanan (DK) PBB dan Majelis Umum PBB untuk bertindak, dan mendesak masyarakat internasional untuk berkomitmen terhadap *two state solution* untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Sementara itu mengenai isu perkembangan terkini di Myanmar, dijelaskan bahwa ada dua bahasan besar terkait kepentingan Indonesia di Myanmar. Pertama adalah pada isu kemanusiaan Rohingya, dan kedua adalah krisis yang terjadi pasca pengambil alihan kekuasaan dari pemerintahan sipil yang sah oleh militer Myanmar. Terkait dengan isu kemanusiaan Rohingya, dijelaskan bahwa saat ini ada upaya untuk membawa pemerintah Myanmar agar bertanggung jawab secara hukum terhadap tuduhan pembantaian etnis di *International Court of Justice (ICJ)*, yang diinisiasi oleh gugatan Gambia. Terhadap upaya hukum ini, Indonesia pada dasarnya tidak menentang, namun memandang bahwa saat ini langkah hukum tersebut bukan merupakan prioritas dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia mengkhawatirkan bahwa hal tersebut akan mengganggu proses yang telah lebih dulu berjalan melalui mekanisme regional ASEAN.

Indonesia bersama dengan Malaysia menyatakan tekad bersama untuk membantu Myanmar melalui pernyataan bersama antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin di Jakarta pada 5 Februari lalu. Peristiwa itu terjadi lebih dari sebulan sejak militer Myanmar merebut kendali dari pemerintahan sipil hasil pemilu sah dan menangkap para pejabatnya, termasuk Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto dengan jabatan resmi Penasihat Negara. Kedua pemimpin kemudian mengutus menteri luar negeri masing-masing untuk menjajaki pelaksanaan pertemuan khusus para pemimpin ASEAN untuk membahas hal tersebut. Pertemuan Pemimpin ASEAN yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 24 April 2021 tersebut menghasilkan lima poin kesepakatan yang ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN atau perwakilannya. Adapun poin kesepakatan tersebut antara lain: Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di

Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kedua, ASEAN juga meminta dimulainya dialog konstruktif antara semua pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat negara itu. Para pemimpin ASEAN juga bersepakat adanya utusan khusus untuk memfasilitasi dialog tersebut dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. Keempat, sepakat untuk menyediakan bantuan kemanusiaan ke Myanmar. Terakhir, pemimpin ASEAN sepakat adanya utusan khusus dan tim delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak yang berkepentingan.

Mengenai isu kerja sama vaksin COVID-19, persoalan utama yang tengah dihadapi oleh mayoritas negara-negara di dunia adalah kapasitas produksi vaksin yang terbatas dan tingginya kebutuhan vaksin yang mendorong terjadinya nasionalisme vaksin. Hal ini juga mengakibatkan distribusi vaksin dan akses terhadap vaksin yang tidak merata. Saat ini, perimbangan distribusi vaksin di negara maju dengan negara berkembang sangat jauh. Negara maju adalah 1:4 (satu banding 4 warga), sedangkan di negara berkembang adalah 1:500.000 (satu banding lima ratus ribu). Indonesia sendiri telah mendistribusikan sebanyak 75 juta vaksin yang terdiri dari tiga merek yang berbeda, yaitu; Sinovac, Astra Zeneca, dan Sinopharm. .

Vaksin Astra Zeneca diperoleh melalui mekanisme kerja sama internasional Covax. Indonesia sendiri mendukung proposal pengabaian TRIP yang diajukan oleh India dan Afrika Selatan ke World Trade Organization (WTO). Tujuan dari proposal tersebut adalah agar vaksin yang telah teruji dapat juga di produksi oleh negara-negara berkembang, sehingga akses kepada vaksin semakin meningkat. Namun demikian yang harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Indonesia adalah, jika pada akhirnya pengabaian TRIP disetujui di WTO, maka industri nasional harus siap dalam menindak lanjuti keputusan tersebut, sehingga Indonesia bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Indonesia juga tengah berupaya untuk dapat menjadi Hub Regional untuk vaksin COVID-19, guna menjamin ketersediaan vaksin tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kawasan Asia Tenggara.



Delegasi DPR RI menghadiri persidangan Virtual IPU General Assembly ke-142

Beberapa pertanyaan atau tanggapan yang disampaikan oleh anggota BKSAP DPR RI adalah sebagai berikut:

- a. **Dr. H. Mardani Ali Sera**, Wakil Ketua BKSAP DPR RI menanyakan mengenai isu Palestina tentang bagaimana Kementerian Luar Negeri saat ini melakukan kajian terhadap sikap Amerika Serikat (AS), terutama terkait dengan *roadmap* solusi dua negara (*two state solution*) di masa pemerintahan Presiden Biden.

Menjawab pertanyaan ini Penny Dewi Herasati menjawab bahwa pemerintahan Biden belum memiliki *roadmap* tersendiri dalam mewujudkan solusi dua negara, dan cenderung mengedepankan gaya diplomasi senyap yang menitik beratkan pada negosiasi politik. Hal ini diterapkan setelah adanya tekanan domestik yang cukup signifikan dari publik AS.

- b. **Didi Irawadi Syamsudin**, Anggota BKSAP (F-Partai Demokrat) menyampaikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan isu Palestina diapresiasi dengan baik. Namun

demikian, seharusnya Pemerintah Indonesia dapat lebih keras dalam bersikap mengingat isu Palestina merupakan isu kemanusiaan dan bukan isu agama. Kemudian disampaikan juga mengenai langkah-langkah Pemerintah Indonesia terkait dengan krisis di Myanmar, bahwa seharusnya Pemerintah Indonesia melalui ASEAN dapat mendorong untuk merumuskan resolusi yang lebih keras pada saat Pertemuan Para Pimpinan ASEAN di Jakarta.



Gilang Dhiella Fararez (F-PDIP) dan Didi Irawadi Syamsuddin (F-PD) menyampaikan pendapatnya terkait paparan Kementerian Luar Negeri

- c. **Puteri A. Komarudin**, Anggota BKSAP (F-Partai Golkar) menanyakan mengenai bagaimana sikap Pemerintah Indonesia mengenai berkembangnya gagasan untuk memberlakukan semacam parpor vaksin internasional. Dikhawatirkan bahwa kebijakan pemberlakuan semacam itu pada akhirnya bersifat diskriminatif mengingat akses terbuka kepada vaksin saat ini masih terus diperjuangkan dalam forum-forum internasional, dan bahwa belum semua negara di dunia melaksanakan vaksinasi bagi warganya. Di samping itu, efikasi dari vaksin juga masih menjadi pertanyaan. Kemudian ditanyakan juga mengenai bagaimana tanggapan Indonesia terhadap upaya Gambia untuk menuntut Myanmar atas genosida terhadap Rohingya di *International Court of Justice*.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, Penny Dewi Herasati menyampaikan bahwa Indonesia tidak menyetujui diberlakukannya semacam paspor vaksin internasional, tetapi tidak menolak apabila yang diberlakukan adalah semacam sertifikat vaksin. Kemudian Indonesia saat ini sedang melakukan *refocusing* APBN, di mana banyak anggaran yang dikeluarkan untuk kontribusi organisasi dipotong, atau belum dibayarkan. Hal ini antara lain yang mendorong Indonesia untuk tidak menyetujui untuk mendukung upaya Gambia di *International Court of Justice*. Mengingat bahwa bentuk dukungan yang dibutuhkan oleh Gambia adalah agar Indonesia ikut membiayai jasa pengacara internasional yang akan menangani tuntutan tersebut.

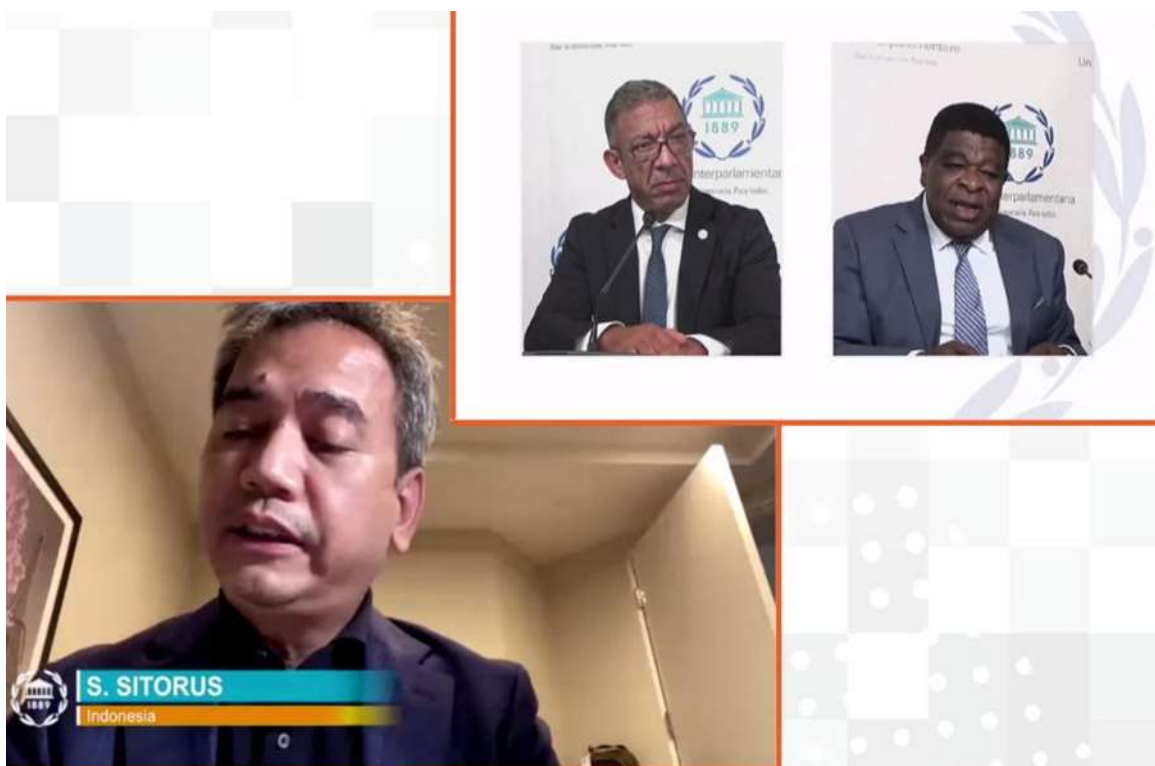
- d. **Dr. Andi Yuliani Paris**, Anggota BKSAP, (F-PAN) menyampaikan bahwa hasil penelitian mengenai pengembangan vaksin nasional seharusnya tetap di Indonesia dan tidak dibawa ke luar negeri, agar pengembangan – pengembangan selanjutnya dari hasil penelitian tersebut dapat dipergunakan sepenuhnya di Indonesia dan bermanfaat secara maksimal bagi rakyat Indonesia.
- e. **Arkanata Akram**, Anggota BKSAP, (F-Nasdem) menyampaikan tanggapannya mengenai isu Palestina. Beliau menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Namun demikian, perlu juga definisi yang jelas mengenai apa yang nantinya dikatakan sebagai negara Palestina tersebut terutama terkait dengan luas wilayah dan batasan wilayahnya. Hal ini karena sampai saat ini, belum jelas definisi tersebut dan masih menjadi salah satu hal yang dipertentangkan oleh Israel.



Arzeti Bilbina (F-PKB) dan Arkanata Akram (F-Nasdem) menyampaikan pendapatnya terkait paparan Kementerian Luar Negeri

Setelah penyampaian tanggapan dan pertanyaan dari anggota BKSAP DPR RI, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, **Dr. Sihar Sitorus** selanjutnya menyampaikan intervensinya pada sesi Debat Umum di Sidang IPU ke-142 yang berlangsung secara virtual. Dalam intervensinya disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dukungan DPR RI pada multilateralisme dan prinsip *burden sharing* dalam mengatasi pandemi COVID-19, menyuarakan pentingnya Hak Asasi Manusia dalam pemulihan pandemi, termasuk dalam vaksinasi. Khususnya mengenai akses yang setara bagi negara-negara untuk memperoleh vaksin. Kemudian juga menggarisbawahi peran Indonesia melalui Menteri Luar Negeri dalam COVAX-AMC Engagement Group.
- b. Menekankan pentingnya pemulihan berkelanjutan paska pandemi COVID-19 (*green economy* dan *low carbon*)
- c. Penyampaian dukungan DPR RI terhadap Proposal *TRIPS Waiver* di WTO yang diusulkan oleh India dan Afrika Selatan.



Dr. Sihar Sitorus, Wakil Ketua BKSAP memberikan intervensinya

Disampaikan juga oleh Wakil Ketua BKSAP bahwa saat ini ada tiga anggota DPR RI terpilih untuk menjabat dalam Biro/Komite di IPU, yaitu Ketua BKSAP DPR RI **Dr. Fadli Zon** dari Fraksi Partai Gerindra yang menjabat di *Standing Committee on Democracy and Human Rights* Periode 2021-2023, Anggota BKSAP DPR RI **Dr. Andi Yuliani Paris** dari Fraksi Partai Amanat Nasional yang menjabat di *Standing Committee on Peace and International Security* Periode 2021-2023, serta Anggota BKSAP DPR RI **Puteri Anetta Komarudin** dari Fraksi Partai Golkar yang menjabat di *Bureau of Women Parliamentarians* periode 2021-2025.

III. KESIMPULAN

1. Secara keseluruhan pelaksanaan Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly ke-142 yang diselenggarakan secara daring dengan tema “*Overcoming the pandemic today and building a better tomorrow: the role of Parliaments*”, ini berlangsung dengan lancar.
2. Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri RI, Delegasi terlibat dengan cukup aktif pada sesi diskusi dan Tanya jawab seputar perkembangan isu-isu internasional yang materinya disampaikan oleh Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri, Ibu Penny Dewi Herasati.

3. Intervensi Indonesia dalam *General Debate IPU* yang disampaikan oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI berlangsung dengan baik.
4. Indonesia berhasil mengisi posisi / jabatan strategis di IPU sampai dengan tahun 2024 dengan jabatan-jabatan sebagai berikut:
 - Dr. Fadli Zon sebagai anggota Standing Committee on Democracy and Human Rights.
 - Puteri A. Komaruddin sebagai anggota Bureau of Women Parliamentarians.
 - Dr. Andi Y. Paris sebagai anggota Standing Committee on Peace and International Security.
5. Wapaulun tidak ada *Emergency Item* di IPU Assembly kali ini, Indonesia Menyampaikan keprihatinan mendalam atas ekspansi yang dilakukan oleh Israel kepada penduduk Palestina di Gaza baru-baru ini.

IV. PENUTUP

A. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran sebagai berikut:

- *Paparan narasumber*
- *Dokumentasi*
- *Liputan media elektronik*

B. KATA PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok Laporan Kegiatan dalam rangka mengikuti sidang virtual *the 142nd Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly (Virtual) "Overcoming the pandemic today and building a better tomorrow: the role of parliaments* pada tanggal 26 April - 27 Mei 2021 secara virtual. Dokumen mengenai sidang akan dijadikan lampiran. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juni 2021

a.n. Ketua Delegasi,



Dr. Sihar Sitorus

A-139

BAHAN PAPARAN

Men



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.

CHAIR'S SCRIPT

**142nd IPU GENERAL ASSEMBLY
26 MAY 2021**

INTRODUCTORY REMARKS

Yth. Para Anggota delegasi BKSAP di Sidang Umum IPU 142

Yth. Ibu Penny Dewi Herasati, Direktur Sosial Budaya dan Ol Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri.

Assalamualaikum Wr., Wb.,

Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu, Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas izin-Nya kita dapat menghadiri sidang 142nd *IPU General Assembly* pada kesempatan ini. Meskipun dilakukan secara virtual, saya berharap pertemuan hari ini dapat mendorong terwujudnya kerja sama antar parlemen dunia dengan menekankan pada prinsip multilateralisme, utamanya dalam merespon berbagai tantangan global baik yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, maupun dalam berbagai sektor strategis lainnya.

Sidang IPU General Assembly adalah sidang tahunan yang diselenggarakan oleh IPU, 2 kali dalam setahun. *Inter Parliamentary Union* atau IPU adalah organisasi internasional yang didirikan pada 1889 dan merupakan organisasi yang mewakili sisi legislatif yang berskala global dengan anggota sebanyak 179 negara. Organisasi ini merupakan forum internasional permanen pertama yang membidangi negosiasi politik antar-negara. Misi IPU seperti yang dicantumkan dalam statutenya adalah memperjuangkan perdamaian dan kerjasama antar bangsa-bangsa.

Sidang IPU ini terdiri dari pertemuan *Governing Council, Assembly, Forum of Women Parliamentarians, Forum of Young Parliamentarians, Standing Committee (SC) on Peace and International Security, SC on Democracy and Human Rights, SC on Sustainable Development, Finance and Trade, SC on UN Affairs, Committee on Middle East Questions, Committee to Promote Respect to International Human Rights* dan pertemuan *geopolitical groups (ASEAN+3 meeting, Asia Pacific Group)*. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara virtual. Sebelumnya, komisi-komisi tersebut sudah melakukan pertemuan dan hasil-hasil pertemuan tersebut akan disertakan di dalam dokumen hasil yang akan difinalisasi oleh *Executive Committee* dan diadopsi pada sesi penutupan Sidang.

Pada sidang IPU Assembly kali ini, 3 orang anggota Parlemen Indonesia berhasil menjadi anggota komite di IPU yaitu, Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon sebagai anggota *Bureau of Standing Committee for Democracy and Human Rights*, Puteri Anetta Komarudin sebagai anggota *bureau of Women Parliamentarians* dan Andi Yuliani Paris sebagai anggota *bureau Standing Committee on Peace and Democracy*. Hal ini merupakan suatu pencapaian, karena mereka akan berperan sebagai perwakilan Indonesia di IPU untuk menyuarakan kepentingan Indonesia di dunia.

Malam ini kita akan mengikuti sesi Assembly dengan agenda debat Umum dengan tema "*Mengatasi pandemi saat ini dan membangun masa depan yang lebih baik: peran parlemen*". Dalam agenda ini, seluruh anggota parlemen dapat memberikan *statement* dan intervensi terkait tema tersebut. Saya akan mewakili delegasi Indonesia untuk memberikan

intervensi pada malam hari ini. Setelah sesi intervensi, agenda selanjutnya adalah paparan dan perkembangan isu terbaru dunia yang akan disampaikan oleh Ibu Penny Dewi Herasati, Direktur Sosial Budaya dan Ol Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri.

20.00 -21.00 INTERVENSI DELEGASI

Interventions (2 minutes max)

- *COVID-19 pandemic is the great reset for all dimensions of our life. Despite its devastating impacts, COVID-19 has potential to shape our health and economy systems to be more sustainable. To this end, we need to strengthen global unity, solidarity, and cooperation to overcome the pandemic and to recover stronger. In Indonesia, we have the national spirit of Gotong Royong or mutual cooperation.*
- *As the key players in both immediate and long-term recovery efforts, parliaments are not only responsible, but also powerful to drive the national responses to be in line with our commitment to achieve Sustainable Development Goals (SDGs) – which I believe could be the fundamental roadmap for us to build a better tomorrow. Besides, parliaments are also in charge of ensuring democracy and fundamental freedom of people that since the rise of pandemic have been undermined.*
- *Investment in COVID-19 recovery, must therefore be based on addressing the problems in the three pillars: economy, society, and*

environment. In this regard, Indonesia is committed to accelerate green economy as the catalysator to recover from the pandemic by focusing on the low-carbon development, resource efficiency, and social inclusion as stated in our National Medium Term Development Plan 2020-2024.

- *An effective and inclusive multilateral system combined with strengthened global collaboration to upscale timely and equitable production and distribution of safe and efficacious diagnostics, therapeutics, and vaccines, is the key to mitigate the COVID-19 pandemic. Indonesia's commitment to the multilateralism approach to ending the pandemic is shown through Indonesia's Co-Chairmanship with Canada and Ethiopia in the COVAX AMC Engagement Group, that aims to provide at least 1.3 billion doses.*
- *Since the central dimension of building back better is the people-centered recovery; it becomes our responsibility as the representatives of people, to act in a synergized manner, in ensuring that all decisions focus on well-being, improve inclusiveness, and reduce inequality which would contribute to build a safe and more resilient world after all.*
- *Last, but not least, I would like to draw your attention to the current situation in Palestine. We deeply request the Inter-Parliamentary Union (IPU) and other international parliament organizations to take collective action and support the measures implemented by countries, including*

the parliamentarians to address the deteriorating situation in the Occupied Palestinian Territory by emphasizing on peaceful and just manner, and most importantly ensuring the humanitarian assistance and protection to Palestinian people, including children, women, people with disability, medical personnel's, media, civilians and innocent people who have been targeted during the conflicts. In times of pandemic like today, we must seek to foster peace, solidarity, and cooperation in order to build a more resilience society, because without peace there is no development, and without development there is no peace.

Untuk acara selanjutnya adalah penjelasan dari Kementerian Luar Negeri untuk isu-isu internasional yang sedang dibahas saat ini.

Ibu Penny dipersilahkan

-----Presentation Kemlu-----

Terima kasih bu penny atas update informasi tentang isu-isu global saat ini. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh anggota delegasi, saya persilahkan

(Jika ada pertanyaan dari floor)

Terima kasih untuk Ibu Penny dari Kementerian Luar Negeri yang sudah memberikan informasi isu terbaru.

Terima kasih kepada seluruh anggota delegasi IPU BKSAP DPR yang hadir pada malam ini

Saya berharap pertemuan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita, terutama bagi anggota BKSAP dalam menjalani tugas diplomasi parlemen, dan tentunya dalam mendukung tercapainya kepentingan nasional Indonesia.

Terima kasih

***Wassalamualaikum, Wr., Wb.
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya.***



**142nd INTER-PARLIAMENTARY UNION
(IPU) ASSEMBLY**

VIRTUAL SESSION



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.

General Assembly Inter-Parliamentary Union

Debat Interaktif “*Overcoming the Pandemic Today and Building a Better Tomorrow: The Role of Parliaments*”

Wednesday, 26 May 2021

19.00 – 21.00 WIB

Interventions (2 minutes max)

- COVID-19 pandemic is the great reset for all dimensions of our life. Despite its devastating impacts, COVID-19 has potential to shape our health and economy systems to be more sustainable. To this end, we need to strengthen global unity, solidarity, and cooperation to overcome the pandemic and to recover stronger. In Indonesia, we have the national spirit of *Gotong Royong* or mutual cooperation.
- As the key players in both immediate and long-term recovery efforts, parliaments are not only responsible, but also powerful to drive the national responses to be in line with our commitment to achieve Sustainable Development Goals (SDGs) – which I believe could be the fundamental roadmap for us to build a better tomorrow. Besides, parliaments are also in charge of ensuring democracy and fundamental freedom of people that since the rise of pandemic have been undermined.
- Investment in COVID-19 recovery, must therefore be based on addressing the problems in the three pillars: economy, society, and environment. In this regard, Indonesia is committed to accelerate green economy as the catalysator to recover from the pandemic by focusing on the low-carbon development, resource efficiency, and social inclusion as stated in our National Medium Term Development Plan 2020-2024.

- An effective and inclusive multilateral system combined with strengthened global collaboration to upscale timely and equitable production and distribution of safe and efficacious diagnostics, therapeutics, and vaccines, is the key to mitigate the COVID-19 pandemic. Indonesia's commitment to the multilateralism approach to ending the pandemic is shown through Indonesia's Co-Chairmanship with Canada and Ethiopia in the COVAX AMC Engagement Group, that aims to provide at least 1.3 billion doses.
- Since the central dimension of building back better is the people-centered recovery; it becomes our responsibility as the representatives of people, to act in a synergized manner, in ensuring that all decisions focus on well-being, improve inclusiveness, and reduce inequality which would contribute to build a safe and more resilient world after all.
- Last, but not least, I would like to draw your attention to the current situation in Palestine. We deeply request the Inter-Parliamentary Union (IPU) and other international parliament organizations to take collective action and support the measures implemented by countries, including the parliamentarians to address the deteriorating situation in the Occupied Palestinian Territory by emphasizing on peaceful and just manner, and most importantly ensuring the humanitarian assistance and protection to Palestinian people, including children, women, people with disability, medical personnel's, media, civilians and innocent people who have been targeted during the conflicts. In times of pandemic like today, we must seek to foster peace, solidarity, and cooperation in order to build a more resilience society, because without peace there is no development, and without development there is no peace.

DOKUMEN TERKAIT PERSIDANGAN



Inter-Parliamentary Union

For democracy. For everyone.

142nd IPU ASSEMBLY

Virtual session, 24-28 May 2021

Governing Council
Item 1

CL/207/A.1
22 March 2021

Provisional agenda of the 207th session of the Governing Council

May 2021

- 1. Adoption of the agenda**
- 2. Adoption of the Special Rules of Procedure for the virtual sessions of the Assembly and Standing Committees**

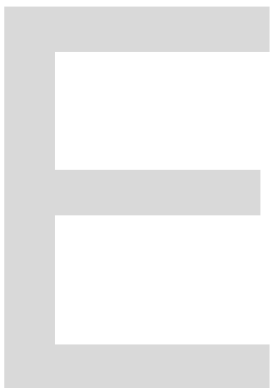
The Special Rules of Procedure have been prepared by the Working Group tasked with preparing the virtual session of the Assembly, with the support of the IPU Secretariat and the independent Legal Counsel, and endorsed by the Executive Committee. They are designed to adapt certain existing Rules, which will be temporarily suspended, to the specificities of a virtual session. The Special Rules of Procedure are being circulated well in advance to the full membership of the IPU and will be formally adopted at the first sitting of the virtual session.
- 3. Approval of the summary records of the 206th session of the Governing Council (CL/206/SR)**

The summary records were sent to all Members on 18 January 2021 and are available on the IPU website at www.ipu.org/event/extraordinary-session-ipu-governing-council#event-sub-page-documents
- 4. Vision of the IPU President and report on his activities since the 206th session of the Governing Council**

The President will share his vision for the IPU. He will report on his activities and on the activities of the Executive Committee since the last session of the Governing Council.
- 5. Annual IPU Impact Report by the Secretary General on the activities of the IPU in 2020**

The Governing Council will receive an update on the implementation of the Strategy for 2017-2021. It will also receive an overview of the status of the strategic partnership between the IPU and the United Nations.
- 6. Elections to the Executive Committee and other IPU bodies**

The Governing Council will elect one member to replace Mr. A. Abdel Aal (Egypt), whose term is due to end at the 207th session of the Governing Council – the vacancy is to be filled by a man or a woman from the Arab Group.



#IPU142

The Governing Council will also be called upon to elect six members of the Committee on the Human Rights of Parliamentarians and two members of the Committee on Middle East Questions. The members of these two Committees are elected in their individual capacity, on the basis of their knowledge and experience in these respective areas.

The Governing Council will be invited to endorse the nominations received from the Geopolitical Groups of MPs to fill vacancies on the various subsidiary bodies of the Council.

7. Financial results for 2020

The Governing Council will be informed of the financial results for 2020.

8. Questions relating to IPU membership

- (a) Achieving universal membership
The Governing Council will be updated on the current membership situation and be informed of initiatives undertaken with a view to achieving universal membership.
- (b) Situation of certain parliaments

9. Future Inter-Parliamentary meetings

10. Activities of committees and other bodies

- (a) Committee on the Human Rights of Parliamentarians
- (b) Forum of Women Parliamentarians
- (c) Committee on Middle East Questions
- (d) Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law
- (e) Gender Partnership Group
- (f) Advisory Group on Health
- (g) Forum of Young Parliamentarians of the IPU
- (h) High-Level Advisory Group on Countering Terrorism and Violent Extremism (HLAG)

11. Other business



Inter-Parliamentary Union

For democracy. For everyone.

142nd IPU ASSEMBLY

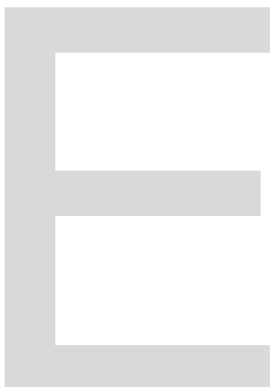
Virtual session, 24-28 May 2021

Assembly

A/142/A.1
26 March 2021

Agenda of the 142nd Assembly

1. General Debate on the theme *Overcoming the pandemic today and building a better tomorrow: the role of parliaments*
2. *Parliamentary strategies to strengthen peace and security against threats and conflicts resulting from climate-related disasters and their consequences*
(Standing Committee on Peace and International Security)
3. *Mainstreaming digitalization and the circular economy to achieve the SDGs, particularly responsible consumption and production*
(Standing Committee on Sustainable Development)
4. Reports of the Standing Committees
5. Approval of the subject items for the Standing Committee on Peace and International Security and for the Standing Committee on Sustainable Development for the 144th Assembly and appointment of the Rapporteurs



#IPU142

GENERAL TIMETABLE OF THE 142nd ASSEMBLY AND RELATED MEETINGS

Virtual session

Pre-Assembly meetings

Tuesday, 13 April 2021

- 14.00 – 16.30 Bureau of the Standing Committee on Peace and International Security*
Zoom
- 14.00 – 16.30 Bureau of the Standing Committee on Sustainable Development*
Zoom

Wednesday, 14 April 2021

- 14.00 – 17.00 Committee on Middle East Questions*
Zoom

Friday 16 April 2021

- Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law*
Zoom

Thursday, 22 April 2021

- 14.00 – 16.30 Standing Committee on Peace and International Security*
Drafting Committee on the draft resolution on *Parliamentary strategies to strengthen peace and security against threats and conflicts resulting from climate-related disasters and their consequences*
Zoom
- 14.00 – 16.30 Standing Committee on Sustainable Development*
Drafting Committee on the draft resolution on *Mainstreaming digitalization and the circular economy to achieve the SDGs, particularly responsible consumption and production*
Zoom

Monday, 26 April 2021

- 14.00 – 16.30 **Standing Committee on Peace and International Security**
Debate on overall theme: *Overcoming the pandemic today and building a better tomorrow: the role of parliaments*

Tuesday, 27 April 2021

- 14.00 – 16.30 **Joint meeting of the Standing Committee on Sustainable Development and of the Standing Committee on UN Affairs**
Debate on overall theme

Wednesday, 28 April 2021

- 14.00 – 16.30 **Standing Committee on Democracy and Human Rights**
Debate on overall theme
- 14.00 – 16.30 Advisory Group on Health*
Zoom

* *closed session*

Thursday, 29 April 2021

14.00 – 16.30

Standing Committee on UN Affairs

Discussion on UN75 follow-up

Thursday, 6 May 2021

14.00 – 16.00

Board of the Forum of Young Parliamentarians*

6- 11 May 2021

14.00 – 17.00

Committee on the Human Rights of Parliamentarians*

Zoom

Monday, 10 May 2021

14.00 – 17.00

Forum of Women MPs

Advancing gender equality: Covid's impact and priorities for recovery

- Briefings on inter-parliamentary e-dialogues held in March-April

- Towards a gender-responsive post-Covid recovery

Contributing to the work of the Assembly from a gender perspective

Elections to the Bureau of Women MPs

Tuesday, 11 May 2021

14.00 – 15.30

Bureau of Women Parliamentarians*

14.00 – 16.00

Bureau of the Standing Committee on Democracy
and Human Rights*

Zoom

Wednesday, 12 May 2021

14.00 – 16.00

Forum of Women Parliamentarians

Panel discussion: *Generation equality in and through parliaments*

Elections of the Bureau's presiding officers

14.00 – 17.00

Committee on Middle East Questions*

Zoom

Thursday, 13 May 2021

14.00 – 16.00

Forum of Young Parliamentarians

Contributing to the work of the 142nd Assembly from a youth
perspective

Parliaments, youth and COVID-19

- Briefings on intergenerational e-dialogues held in April

- Prioritizing youth empowerment in post-Covid recovery

Elections to the Board of the Forum of Young Parliamentarians

14.00 – 16.00

Bureau of the Standing Committee on UN Affairs*

Zoom

Friday, 14 May 2021

14.00 – 16.00 Board of the Forum of Young Parliamentarians*

Monday, 17 May 2021

14.00 – 17.00

Forum of Young Parliamentarians

Panel discussions:

- A new decade of action for the IPU and parliaments on youth participation
- Launch of the Campaign
- Elections of the Board of the Forum of Young Parliamentarians (election of the President of the Board)

14.00 – 16.30

Standing Committee on Peace and International Security

Adoption of resolution on *Parliamentary strategies to strengthen peace and security against threats and conflicts resulting from climate-related disasters and their consequences*

14.00 – 16.30

High-Level Advisory Group on Countering Terrorism and Violent Extremism*
Zoom

Tuesday, 18 May 2021

14.00 – 16.30

Standing Committee on Sustainable Development

Adoption of resolution on *Mainstreaming digitalization and the circular economy to achieve the SDGs, particularly responsible consumption and production*

14.00 – 16.30

Standing Committee on Democracy and Human Rights

Debate on *Legislation worldwide to combat online sexual child exploitation*

* *closed session*

Assembly meetings

Tuesday, 18 May 2021

14.00 – 17.00 Sub-Committee on Finance*
Zoom

Wednesday, 19 May 2021

14.00 – 17.00 **Executive Committee***
Zoom

Thursday, 20 May 2021

14.00 – 17.00 **Executive Committee***
Zoom

Monday, 24 May 2021

14.00 – 17.00 **Governing Council**

Tuesday, 25 May 2021

14.00 – 17.00 **Governing Council**

Wednesday, 26 May 2021

10.00 – 13.00 ASGP Meeting - *The role and organization of parliaments in a time of pandemic*

14.00 – 17.00 **Assembly**
Interactive debate on overall theme *Overcoming the pandemic today and building a better tomorrow: the role of parliaments*
Video messages

Thursday, 27 May 2021

10.00 – 13.00 ASGP Meeting - *The role and organization of parliaments in a time of pandemic*

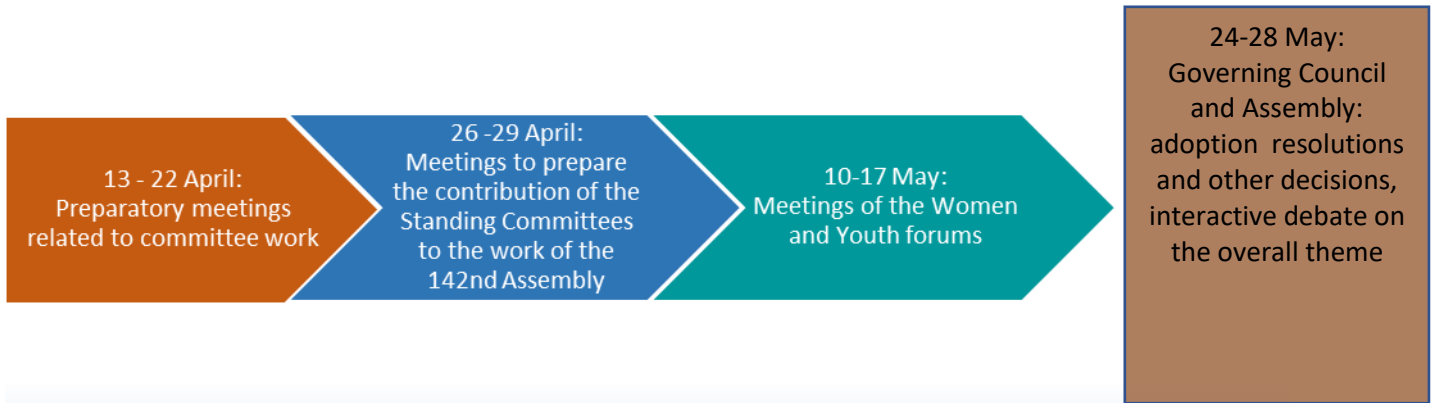
14.00 – 17.00 **Assembly**
Adoption of Resolutions
Reports by Standing Committees
Adoption of outcome document

Friday, 28 May 2021

14.00 – 17.00 **Governing Council** (if required)

* *closed session*

MAIN TIMELINES FOR THE ADOPTION OF DECISIONS AT THE 142ND IPU ASSEMBLY



Timeline for the preparation of the resolutions

12 March 2021	Revised resolutions posted on the IPU website / request for amendments sent
2 April 2021	Deadline for Member Parliaments to submit written amendments to the draft resolutions
12 April 2021	Amendments posted on the IPU website and provided to the Drafting Committee members
22 April 2021	Meetings of the Drafting Committees
23 April 2021	Revised draft resolution sent to IPU Member Parliaments Start of the 15-day silence procedure
17 May 2021	Meeting of the Standing Committee on Peace and Security to formally announce the result of the silence procedure
18 May 2021	Meeting of the Standing Committee on Sustainable Development to formally announce the result of the silence procedure

Timeline for the choice of a subject item

12 March 2021	Request for subject items sent
2 April 2021	Deadline for Member Parliaments to submit subject items
13 April 2021	Meetings of the Bureau of the Standing Committee on Peace and Security and the Bureau of the Standing Committee on Sustainable Development
23 April 2021	Subject item proposals sent to IPU Member Parliaments Start of the 15-day silence procedure
17 May 2021	Meeting of the Standing Committee on Peace and Security to formally announce the result of the silence procedure
18 May 2021	Meeting of the Standing Committee on Sustainable Development to formally announce the result of the silence procedure



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.

142nd IPU ASSEMBLY

Virtual session, 24-28 May 2021

Assembly

A/142/Inf.1-rev.1
29 March 2021

Vacancies to be filled during the 142nd Assembly

*All candidatures need to be accompanied by a signed covering letter, a brief curriculum vitae (maximum one page) and a completed contact information form. Candidatures for the Executive Committee, the Committee on Middle East Questions and the Committee on the Human Rights of Parliamentarians must be received by 18:00 (Geneva time) on **9 May 2021**. Nominations by the Geopolitical Groups for the Bureau of Women Parliamentarians and the Board of the Forum of Young Parliamentarians must be received by 18:00 (Geneva time) on **26 April 2021**. All other nominations by the Geopolitical Groups must be received by 18:00 (Geneva time) on **16 May 2021**. Candidatures should be submitted to documents@ipu.org.*

Executive Committee

At its next session, the Governing Council will elect **one member**, as follows:

Arab Group : One vacancy, to be filled by a man or a woman, to replace Mr. A. Abdel Aal (Egypt), whose Executive Committee term ends at the 207th session of the Governing Council.

Committee on the Human Rights of Parliamentarians

The Governing Council will elect **six members** to replace Mr. D. Carter (New Zealand), Ms. A. Jerkov (Serbia) and Mr. J. Kim (Republic of Korea), who are no longer members of parliament; Ms. J.M. Zabwe (Uganda), whose parliamentary mandate ends in mid-May 2021; and Ms. D. Solórzano (Venezuela) and Mr. A.A. Alaradi (Bahrain), whose membership of the Committee expires at the 207th session of the Governing Council.

In light of the Committee's rule on the promotion of gender equality and of its current composition, those interested in submitting their candidatures should bear in mind that ideally, in order to have full parity, three of the new members should be male parliamentarians and three of the new members should be female parliamentarians.

Please note that although the composition of this Committee should reflect an equitable geopolitical distribution of seats, members of this Committee are elected in their individual capacity, not as representatives of their parliament or geopolitical group.

Parliamentarians wishing to become members of this Committee are required to meet a set of distinct criteria. Candidates are therefore requested to complete the form available on the IPU website: <https://www.ipu.org/file/10417/download>

#IPU142

Committee on Middle East Questions

The Governing Council will elect **two members** to replace Mr. M. Al Mehrzi (United Arab Emirates), who is no longer a member of parliament, and Ms. S. Atallahjan (Canada), whose membership of the Committee expires at the 207th session of the Governing Council.

In light of the Committee's rule on gender balance, those interested in submitting their candidatures should bear in mind that in order to have full parity, one new member should be a male parliamentarian, and one new member should be a female parliamentarian.

Please note that, although the composition of this Committee should reflect a diverse geopolitical representation, members of this Committee are elected in their individual capacity, not as representatives of their parliament or geopolitical group.

Nominations to be received from the Geopolitical Groups

Bureau of Women Parliamentarians

At the next statutory Assembly, the Forum of Women Parliamentarians will be required to renew half of the membership of its Bureau.

Two regional representatives are to be elected from each geopolitical group, for a four-year term, to replace those regional representatives whose term expired in April 2020.

According to the Rules of the Forum of Women Parliamentarians, a retiring member of the Bureau shall not be eligible for re-election for two years.

The Forum of Women Parliamentarians will also replace **five members**, from the African Group, Arab Group, Asia-Pacific Group, and the Twelve Plus Group respectively, who are no longer members of parliament, and from the Group of Latin America and the Caribbean (parliamentary mandate ends as of April 2021), and whose terms of office end in April 2022.

In light of the Forum's rule on the promotion of gender equality and of its current composition, only female parliamentarians may submit their candidatures for these four vacancies.

Board of the Forum of Young Parliamentarians of the IPU

At its next meeting, the Forum will elect its Board.

According to Rule 5.3 of the Forum's Rules and working modalities: "The Board shall be composed of two representatives from each of the IPU geopolitical groups, a man and a woman", below the age of 45 years.

Each geopolitical group is therefore invited to nominate two young parliamentarians, one of each sex, as their representatives on the Board.

Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law

The Governing Council will elect **four members**, as follows:

- | | | |
|-------------------------------------------------|---|-------------------------------------|
| African Group | : | One vacancy to be filled by a man |
| Arab Group | : | One vacancy to be filled by a man |
| Asia-Pacific Group | : | One vacancy to be filled by a woman |
| Group of Latin America and the Caribbean | : | One vacancy to be filled by a man |

High-Level Advisory Group on Countering Terrorism and Violent Extremism

The Governing Council will elect **seven members**, as follows:

- African Group** : Two vacancies, at least one of which is to be filled by a woman
- Arab Group** : One vacancy to be filled by a woman
- Asia-Pacific Group** : One vacancy to be filled by a man
- Group of Latin America and the Caribbean** : Two vacancies, at least one of which is to be filled by a woman
- Twelve Plus Group** : One vacancy to be filled by a woman.

Working Group on Science and Technology

At the 141st IPU Assembly, the governing bodies endorsed the establishment of the Working Group on Science and Technology. The modalities for the Working Group are expected to be approved on the occasion of the 142nd Assembly, and the geopolitical groups are therefore invited to submit the candidatures of members of parliament based on their proven expertise and experience in the science and technology sector.

The Governing Council will elect **21 members**, according to the following formula (Executive Committee geopolitical group quota plus one per group). The composition shall therefore be:

- African Group** : Five members, which will include at least two men and two women
- Arab Group** : Two members, which will include an equal number of men and women
- Asia-Pacific Group** : Four members, which will include an equal number of men and women
- Eurasia Group** : Two members, which will include an equal number of men and women
- Group of Latin America and the Caribbean** : Three members, which will include at least one man and one woman
- Twelve Plus Group** : Five members, which will include at least two men and two women

In addition, one representative of the Bureau of Women Parliamentarians and one representative of the Board of the Forum of Young Parliamentarians shall be ex officio members.

STANDING COMMITTEE BUREAUX

The Standing Committees will hold the following elections:

Standing Committee on Peace and International Security

There are **seven vacancies** to be filled by the following geopolitical groups:

- African Group** : One vacancy, to be filled by a man or a woman
- Arab Group** : One vacancy, to be filled by a man or a woman
- Asia-Pacific Group** : Three vacancies, at least one of which is to be filled by a woman
- Group of Latin America and the Caribbean** : Two vacancies, at least one of which is to be filled by a woman

Standing Committee on Sustainable Development

There are **ten vacancies** to be filled by the following geopolitical groups:

- African Group** : Three vacancies, at least one of which is to be filled by a woman
- Arab Group** : One vacancy, to be filled by a man or a woman
- Asia-Pacific Group** : One vacancy, to be filled by a man or a woman
- Eurasia Group** : One vacancy, to be filled by a woman
- GRULAC** : Two vacancies, at least one of which is to be filled by a man
- Twelve Plus Group** : Two vacancies, at least one of which is to be filled by a man.

Standing Committee on Democracy and Human Rights

There are **seven vacancies** to be filled by the following geopolitical groups:

- African Group** : Two vacancies, at least one of which is to be filled by a woman
- Asia-Pacific Group** : Two vacancies, at least one of which is to be filled by a man
- Eurasia Group** : One vacancy, to be filled by a man or a woman
- GRULAC** : One vacancy, to be filled by a man or a woman
- Twelve Plus Group** : One vacancy, to be filled by a man or a woman.

Standing Committee on United Nations Affairs

There are **eight vacancies** to be filled by the following geopolitical groups:

- African Group** : One vacancy, to be filled by a woman
- Arab Group** : Three vacancies, at least one of which is to be filled by a woman
- Asia-Pacific Group** : One vacancy, to be filled by a woman
- Eurasia Group** : One vacancy, to be filled by a man or a woman
- GRULAC** : Two vacancies, at least one of which is to be filled by a woman.

RANCANGAN RESOLUSI



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.

142nd IPU ASSEMBLY

Virtual session, 24-27 May 2021

Standing Committee on
Peace and International Security

C-I/142/DR.rev-1
8 March 2021

Parliamentary strategies to strengthen peace and security against threats and conflicts resulting from climate-related disasters and their consequences

***Draft resolution submitted by the co-Rapporteurs
Ms. C. Roth (Germany), Mr. Y. Sow (Senegal) and
Mr. S. Samarasinghe (Sri Lanka)***

The 142nd Assembly of the Inter-Parliamentary Union,

- (1) *Recalling* the 2015 Paris Agreement, including its goals to strengthen the global response to climate change and to enhance adaptive capacity, increase resilience and reduce vulnerability to climate change; the outcomes of the Climate Change Conferences in Marrakesh (COP 22), Bonn (COP 23), Katowice (COP 24) and Madrid (COP 25) and the IPU resolutions of the corresponding Parliamentary Meetings in Marrakesh, Bonn and Krakow,
- (2) *Recalling also* the IPU resolutions *The role of parliaments in ensuring sustainable development through the management of natural resources, agricultural production and demographic change* (adopted at the 124th IPU Assembly, Panama, April 2011), *Towards risk-resilient development: Taking into consideration demographic trends and natural constraints* (adopted at the 130th IPU Assembly, Geneva, March 2014), *Sustaining peace as a vehicle for achieving sustainable development* (adopted at the 138th IPU Assembly, Geneva, March 2018), the Hanoi Declaration: *The Sustainable Development Goals: Turning Words into Action* (132nd IPU Assembly, Hanoi, April 2015), and *Addressing climate change* (141st IPU Assembly, Belgrade, October 2019),
- (3) *Guided by* the UN 2030 Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals (SDGs), which emphasize that climate policy, sustainable development, poverty reduction and universal peace are all inextricably linked,
- (4) *Mindful of* UN Security Council (UNSC) resolutions and UNSC presidential statements addressing the adverse effects of climate change on international stability, peace and security, such as UNSC Resolutions 2349 (2017), 2408 (2018), 2423 (2018), 2429 (2018), 2431 (2018), and 2457 (2019),
- (5) *Mindful also of* UNSC Resolutions 1325 (2000) and 2467 (2019) highlighting the impact on women of war, conflicts and displacement as well as strengthening the role of women in conflict management and women's involvement in peace and security issues; and of UNSC Resolution 2250 (2015) highlighting the importance of increasing representation of youth in decision-making on peace and security issues,
- (6) *Recalling* the 1996 UN Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes and the 2015 Sendai



#IPU142

#IPU134



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.

142nd IPU ASSEMBLY

Virtual session, 24-27 May 2021

Framework for Disaster Risk Reduction, which provide an important foundation for sustainable, low-carbon, resilient development,

E

#IPU142

#IPU134

- (7) *Welcoming* the international community's continuing engagement in numerous global initiatives to address climate change, such as the UN Climate Action Summit in September 2019, the Climate Ambition Summit in December 2020, and the Climate Adaptation Summit in January 2021, which have led to States' affirmation and extension of emission reduction targets, and have showcased the many opportunities for prevention, mitigation, resilience-building and adaptation through the contributions of national governments, provinces, cities and villages, business corporations, financial institutions and civil society,
- (8) *Recalling* the Universal Declaration of Human Rights as well as subsequent binding human rights agreements and protocols; and welcoming the discussion of climate change as a rapidly growing, global threat to human rights and to peace at the 42nd session of the Human Rights Council in September 2019,
- (9) *Emphasizing* the recommendations of the 2015 Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced Persons in the Context of Disaster and Climate Change being implemented by the Platform on Disaster Displacement, which works towards strengthening the management of disaster displacement risks as well as better protection for people displaced across borders in the context of disasters, including climate-related disasters,
- (10) *Noting* that the world would face unprecedented challenges and irreversible processes, including the crossing of so-called tipping points, with a temperature rise beyond 1.5 degrees Celsius, as referred to in the 2018 special report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,
- (11) *Recalling* that natural resources, such as water and land, shape billions of people's livelihoods, food sovereignty, well-being and identity, and that, therefore, inclusive public participation, dialogue and cooperation are key to equitable and peaceful natural-resource management,
- (12) *Concerned about* the concrete and existential threat to humanity and human security caused by climate change, which adversely affects global peace and stability; concerned particularly about the severe consequences of sea level rise, drought, desertification, land degradation, loss of infrastructure, food insecurity, an increasing scarcity of natural resources, including water, and non-economic loss and damages; concerned about new and/or intensified displacement and migrant movements as these phenomena increase and parts of the world become uninhabitable; and concerned about the effects in particular on young people and their future,
- (13) *Gravely concerned about* the particular effects of climate change on individuals and groups in already vulnerable situations, mainly women and children as well as refugees, displaced people including internally displaced people; highlighting that people displaced for environmental reasons, by disasters or adverse effects of climate change, do not benefit per se from any official refugee status nor from international protection granted by the 1951 Refugee Convention; and concerned also that climate-related tensions and disasters may lead to heightened marginalization, discrimination and abuse, including an increase in sexual and gender-based violence perpetrated mainly against women **and girls**,
- (14) *Aware of* the adverse effect of climate change on existing economic, social and political imbalances as well as distributional conflicts throughout the world; highlighting that, through these negative impacts on human security, climate change should be regarded as a "risk multiplier" with the ability to amplify existing social tensions – especially when governance structures are already weak; recalling that the negative long-term implications of climate change may lead to an increase in political tensions, both within and beyond national borders; noting that fragile societies, including societies plagued by conflict, tend to have weaker adaptation capacities to climate change than others, and that they lack the capacity to contribute for their part to climate change mitigation effectively,
- (15) *Concerned* that these and other human security impacts such as heightened food and water insecurity may exacerbate existing and create additional risks to national, regional and international security, and gravely concerned that the most vulnerable parts of the world are particularly hit by both the climate crisis and the coronavirus pandemic, with one crisis exacerbating the other,
- (16) *Bearing in mind* that access to the resources and means required to cope with situations of dramatic change such as the climate crisis is structurally obstructed by existing forms of discrimination and vulnerability based on gender, race, ethnicity, religion, political or other affiliation, national or social origin, property, birth or other status, ability, indigeneity, age, tradition and institutional mistreatment, all of which can intersect and combine and should be duly considered in concepts of peacebuilding and conflict management as well as resilience and adaptation strategies,

(17) *Stressing* that politics determine long-term sustainable climate action, which is why the responsibility to create a just transition through climate-sustainable policies cannot be shifted onto individuals and their individual choices as consumers, at least not predominantly,

1. *Calls for* immediate and multilateral action to address climate change and mitigate its effects on international stability and security with the same urgency as the fight against the coronavirus pandemic; and therefore calls on all parliaments to expedite and facilitate the ratification and human-rights based implementation of the Paris Agreement in their respective countries;
2. *Calls on* IPU Member Parliaments and their governments to invest in climate-resilient development programmes with a focus on SDGs 1 (poverty eradication), 2 (food security), 3 (health), 4 (education), 5 (gender equality), 6 (water and sanitation), 7 (affordable and clean energy), 8 (decent work), 11 (resilient communities), 13 (climate action) and 16 (peace, justice and strong institutions);
3. *Welcomes* the many and diverse national commitments to address the climate-security nexus, confine climate change, and address climate-induced security threats through mitigation, resilience-building and adaptation; and stresses that measures tend to be more conflict-sensitive if both men and women, as well as marginalized and vulnerable groups, are involved;
4. *Invites* IPU Member Parliaments to encourage their governments to join and support the Group of Friends on Climate and Security established by Nauru and Germany, made up of more than 50 States, which works to ensure that the UNSC considers the relationship between climate and security in all its decisions so that the international community is prepared before conflicts erupt or escalate, wherever climate change threatens peace and security;
5. *Encourages* IPU Member Parliaments to engage in civil conflict prevention, and to anchor risk analysis and forecasts in their policies, with a special focus on security-related tipping points in the context of climate change based inter alia on human rights indicators such as the incidence of sexual and gender-based violence;
6. *Stresses* the need to promote research, data collection and analysis of climate-related security risks including displacement resulting from rapid- and slow-onset disasters in the context of climate change, in order to be prepared for future challenges and develop prevention strategies;
7. *Calls on* parliaments to strengthen local and community governance capacities and adaptation capabilities in order to avoid human rights abuses and the destabilization of sub-regions or nations as a result of climate change;
8. *Encourages* parliaments to adopt enabling climate-responsive and gender- and conflict-sensitive legislation, including key budget laws, aimed at advancing the SDGs, sustaining peace agendas and ensuring that the climate-security nexus features regularly in their parliamentary debates; in this context, ensuring that all peacebuilding and development efforts are assessed for climate sensitivity to minimize predictable future destabilizing effects of climate change on security and prosperity; and conversely, that climate mitigation and adaptation programmes and strategies are conflict-sensitive and designed for maximising peacebuilding synergies;
9. *Calls on* governments to take concrete measures to mitigate climate risks and promote resilience to climate change, while basing these measures on the principle of common but differentiated responsibilities; and, in this context, calls on governments and parliaments to support countries affected by climate-related disasters and to provide financial, technical and capacity-building assistance, in particular from high-income economies to middle- and low-income economies, to help the latter adjust to climate change, based on the "polluter pays" principle, to share the costs more equitably between the countries most responsible for, and the countries most affected by, the effects of historic and current carbon emissions;

10. *Calls on* parliaments to hold their respective governments accountable for achieving the progress required in addressing climate-related disasters and security risks, and to urge their governments to address funding gaps for activities redressing the consequences of climate change and for adaptive measures to equip the United Nations system, other multilateral institutions, States and other relevant actors to deal with the looming changes regarding food security, displacement, and increased risk of disasters;
11. *Also calls on* parliaments to monitor climate-change mitigation and adaptation processes in line with the commitments made under the Paris Agreement; promote strong disaster risk governance to help all stakeholders coordinate at the community, regional and national levels in order to manage and reduce disaster and climate-related risks; facilitate short-term disaster management as well as long-term financing in support of resilience-oriented physical infrastructure and ecosystem-based solutions; and effectively control State finances by ensuring full transparency of expenses;
12. *Urges* parliaments and **their respective governments** to take action to strengthen our common understanding of climate-related risks and threats; to make sure that proper educational programmes are implemented and included in school curricula; and to devise easily accessible early-warning systems;
13. *Calls on* parliaments to examine all means of enhancing the resilience of people adversely affected by climate change; to develop comprehensive gender-responsive national resilience mechanisms by fully including women in the design and implementation of such mechanisms; to strengthen disaster risk reduction and prevention; and to enhance disaster preparedness;
14. *Urges* parliaments to promote and increase predictable, multi-year, unearmarked, collaborative and flexible humanitarian financing, including for disaster displacement; to connect the humanitarian-development-peace nexus with the effects of climate change; and to enable transition aid to cover urgent needs and the possibility of a stronger, faster and more inclusive rebuilding policy, according to the "build back better" approach;
15. *Calls on* parliaments to partner with civil society in a regular and consistent way in order to strengthen political will to address the climate-security nexus in a constructive, participative and forward-looking manner; and also calls in particular on all parliamentarians to engage in dialogue with youth, as they are the main group to face the consequences of climate change;
16. *Encourages* governments to fully support international working groups on climate-related disaster displacement and migration; and to implement, within the architecture of the United Nations Framework Convention on Climate Change, the recommendations of the Warsaw International Mechanism's Task Force on Displacement;
17. *Calls on* parliaments to allow safe, orderly, legal and self-determined migration for those who have to leave their home as a result of climate change; and to enable planned, dignified and self-determined relocation;
18. *Encourages* governments and parliaments to fully implement the UN Guiding Principles on Internal Displacement; to strengthen rights and local agreements on mobility of migrant workers, nomads and pastoralists; and to implement the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration;
19. *Also encourages* governments to reflect upon the concept of "climate passports" that would allow people who are existentially threatened by the effects of climate change and have no choice but to leave their home to exercise self-determination in deciding about their migratory options and enjoy the possibility of entering and settling in secure countries; and, in this context, to consider granting full access to civic rights to migrants who, expecting or following the complete disappearance of their country's territory, de facto or de jure lose their citizenship;

20. *Invites* the IPU Member Parliaments to make use of their right to speak at the UN General Assembly to request follow-up on displacement and migration in the context of climate change as well as on the implementation of the Global Compacts on Migration and Refugees;
21. *Recommends* that all States concerned agree on a common position in order to impose an embargo on the export of arms to actors in States suffering from insecurity, fragility and conflicts – including as a result of climate-related disasters;
22. *Encourages* governments to include the attenuation of climate-change-related security risks in all operational areas of peacebuilding, including early warning, mediation and peace support operations; to enable the UN system to better recognize, assess and act on climate-security interlinkages; to call on the UNSC to acknowledge the threat that climate-related risks pose to international peace and security; and to support the newly created UN Climate Security Mechanism (in facilitating the creation and dissemination of adequate risk assessments and risk management strategies by relevant UN actors);
23. *Welcomes*, in this regard, concrete initiatives to strengthen capacities in the field, i.e. by establishing the first climate and security advisor at the UN mission in Somalia;
24. *Reminds* all States that ambitious climate protection, resilience-building and foresighted behaviour that places human beings and their needs at the centre of all political considerations is a prerequisite not only for achieving climate justice, but also for pursuing the sustaining peace agenda;
25. *Encourages* IPU Member Parliaments to set up or step up regional "climate parliaments" and follow the examples of initiatives in Asia (Bangladesh, China and India), Latin America (Bolivia, Chile, Ecuador and Peru), the Middle East and North Africa (Jordan, Morocco and Tunisia), sub-Saharan Africa (Benin, Côte d'Ivoire, Congo, Senegal and Tanzania, as well as cooperation with the Pan-African Parliament) and Europe (within the European Parliament) with the aim of educating and empowering parliamentarians in this context;
26. *Urges* parliaments to adopt, implement and monitor national action plans in line with the commitments made under the Paris Agreement and thereby establish strategies that prepare for the above-described challenges, threats and conflicts resulting from climate-related disasters and their consequences.



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.

142nd IPU ASSEMBLY

Virtual session, 24-27 May 2021

Standing Committee on
Sustainable Development

C-II/142/DR-rev
8 March 2021

Mainstreaming digitalization and the circular economy to achieve the SDGs, particularly responsible consumption and production

***Draft resolution submitted by the co-Rapporteurs
Mr. A. Gryffroy (Belgium), Mr. P. Mariru (Kenya) and Ms. S.-M. Dinică (Romania)***

The 142nd Assembly of the Inter-Parliamentary Union,

- (1) *Fully endorsing* the Political Declaration of the Sustainable Development Goals Summit (September 2019), which reaffirms the commitment to advance the 2030 Agenda for Sustainable Development, and calls for accelerated action in order to achieve the SDGs,
- (2) *Recalling* the Ministerial Declaration of the 2019 United Nations Environment Assembly, particularly the commitment made by governments worldwide to "improve national resource management strategies with integrated full life-cycle approaches and analysis to achieve resource efficient and low-carbon economies",
- (3) *Welcoming* the establishment of the Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency, which aims to support the transition to a global circular economy for more efficient and equitable use of resources so as to achieve sustainable consumption and production, and inclusive and sustainable industrialization,
- (4) *Underlining* that the circular economy and digitalization, and the interplay between them, can make a major contribution to reaching the SDGs, particularly responsible consumption and production,
- (5) *Being mindful* that due to COVID-19 we are facing major disruption that will force us to use our limited means even more efficiently against the background of the crisis,
- (6) *Stressing* that the COVID-19 pandemic has reversed hard-won development gains and has exposed the deep inequalities and the challenges addressed by the 2030 Agenda for Sustainable Development, thus making the achievement of the SDGs all the more necessary and urgent,
- (7) *Emphasizing* that responsible consumption and production are pivotal and cross-cutting elements of the SDGs, and crucial means to build back better and greener, as they enable the efficient use of natural resources, minimize environmental degradation, pollution and waste, and consider each stage of the life cycle while creating opportunities for social and economic development,



#IPU142

- (8) *Aware* that the pandemic crisis has revealed the precariousness of long and complex value chains, and the flaws of the linear “take-make-use-dispose” pattern of production and consumption,
- (9) *Noting* that the price of products does not always reflect environmental or social costs, such as pollution effects or underpaid labour, which have a negative impact on people’s health and quality of life,
- (10) *Stressing* that circular economy transformation, although predominantly associated with product manufacturing or resource intensive industries and value chains, refers to the economy as a whole, including service dominated industries, thus requiring the engagement of the full range of actors across each industry and sector;
- (11) *Noting* that the world is currently in the midst of the creation of a more circular economy and of the digital revolution, both of which have the power to transform our economy and society,
- (12) *Noting also* that enormous efforts are currently being made by national and international policymakers to promote and regulate both transitions but mostly without aligning their efforts or creating bridges between policies,
- (13) *Underscoring* that, through “digital for development” (D4D) policy, consideration is being given to how digitalization could change people’s lives and **countries should work together towards economic partnership and digital development** how the European Union could work in economic partnership with developing countries, rather than providing development assistance, to create jobs and economic growth, **whilst recognizing the important use of international public finance, including official development assistance as emphasized by the *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Declaration*,**
- (14) *Noting* that digitalization gives rise to novel digital platforms, helps create new kinds of markets, which can be based on the virtualization of products and processes, and facilitates easier and more efficient networking, collaboration and co-creation with stakeholders,
- (15) *Bearing in mind* that digitalization helps to cut costs and increase efficiency, including efficiency of resources,
- (16) *Underscoring* the central role of international digital learning and collaboration platforms, often with virtual technologies, for learning, networking and co-creation,
- (17) *Aware* that digitalization is not a goal in itself, but an enabler and an accelerator to effectively achieve all 17 SDGs,
- (18) *Highlighting* the fact that the COVID-19 crisis has only accelerated the digital revolution,
- (19) *Underscoring* that any future disaster reduction strategy will be (big) data driven,
- (20) *Paying due regard* to avoiding the most vulnerable people becoming victims of the ~~circular economy and digital transition~~ **COVID-19 pandemic** by including **cooperation and solidarity** in the recovery process in order to fully seize the opportunities of the current crisis,
- (21) *Stressing* that the shift to a circular economy would allow countries to decouple growth from resource use and environmental impact, generate economic opportunities, build long-term resilience, protect the environment and human health,
- (22) *Underlining* that the implementation of the circular economy principles in key sectors can play a critical role in reducing greenhouse gas emissions and successfully addressing climate change,

(23) *Bearing in mind* that creating consumer demand for resource efficient products can be a challenge, as environmentally sustainable products may not be easily available, affordable, user-friendly or functional and attractive to consumers, especially at the early stages of their development,

(24) *Acknowledging* the potential of digitalization to strengthen the circular economy, and stressing that circular economy and sustainability principles should be at the heart of digitalization,

(25) *Noting* that digitalization and the circular economy currently benefit from the following "bridging technologies": the internet of things, artificial intelligence, big data, 3D printing, augmented reality and blockchain,

(26) *Recognizing* that the circular economy and digitalization contribute to equitable economic growth and enable women's economic empowerment and youth-led collective action,

(27) *Emphasizing* that mainstreaming digitalization and the circular economy requires ambition, political will and a fundamental change of vision at all levels, which go far beyond the standard digital and environmental political agendas, and must be based on a systemic national approach with the participation of all sectors of society, as well as on enhanced international cooperation,

1. *Invites* parliaments to give digitalization and the circular economy more prominence on the political agenda, as part of their efforts to address the SDGs, particularly responsible consumption and production;
2. *Calls on* parliaments to mainstream digitalization and circular economy principles into public policies and national strategies, and to adopt an enabling framework for their implementation;
3. *Urges* parliaments to promote adequate regulatory frameworks, including economic and financial incentives, with a view to enabling circular economy models to deliver sustainable products and services that are both scalable and competitive in terms of price, quality and convenience;

Add new operative paragraph after paragraph 3 to read as follows:

Encourage financial and banking institutions to re-orienting loans and investments towards more sustainable technologies and innovative business models and setting target for maximum eco-effectiveness in products deliveries;

4. *Calls on* all actors to make the right innovative choices against the background of the pandemic and to prioritize future-proof and sustainable sectors and technologies while benefitting from the huge social, economic and ecological advantages of smart digitalization;
5. *Invites* parliaments to recognise the need for and opportunity of a resilient and low-carbon recovery from COVID-19, as a precondition for achieving the 2030 Agenda, and calls on them to ensure that recovery plans incorporate responsible consumption and production practices, based on digitalization and circular economy principles, among others;
6. *Calls on* parliaments to adopt legislation that addresses food waste and loss at every phase and level of the food supply chain, and to stimulate the use of new technologies for the creation of an integrated agricultural and food system whereby food utilization is optimized and loss and waste of resources are minimized;
7. *Urges* parliaments to support policies that encourage resource recycling, the control of primary material consumption, and the utilization of abundant resources to facilitate

sustainable resource management, and invites them to encourage new business and service models that are not dependent on mass consumption of primary materials;

8. *Requests* parliaments to ensure that the functioning of all public institutions, central and local, takes a more holistic approach to sustainability, while incorporating both digital and circular economy principles, including the adoption of green and sustainable procurement;
9. *Invites* parliaments to encourage international policy coordination and harmonization of standards, regulations and policies for the circular economy;
10. *Calls on* parliaments to create an environment conducive to the development and application of digital solutions, such as the internet of things, artificial intelligence and blockchain, aimed at maximizing the potential of the circular economy;
11. *Also calls on* parliaments, as part of efforts to create an enabling environment for digitalization and the circular economy, to place special emphasis on data policies and common data architecture;
12. *Invites* parliaments to encourage research and development, innovation and knowledge-sharing for the uptake, upscaling and replication of innovative business practices based on digitalization and the circular economy;
13. *Calls on* parliaments from donor countries to ensure that international development cooperation agencies mainstream digitalization and circular economy principles in their financial assistance and capacity-building programmes aimed at supporting COVID-19 economic recovery and SDG implementation;
14. *Also calls on* governments to integrate digital skills and a circular way of life in education at the earliest possible stage; and to conduct awareness campaigns to encourage consumers' engagement in sustainable practices;
15. *Invites* parliaments to create an enabling environment for citizens' access to digital solutions;
16. *Also invites* parliaments and governments to allocate appropriate financial resources to encourage the development of both digital and circular economy business models, while specifically empowering young and women entrepreneurs;
17. *Encourages* parliaments to support efforts by regional and local institutions to foster urban sustainability through the development of inclusive, safe, resilient and sustainable smart cities that digitally optimize communication, transport, energy and the environment, according to circular economy and digitalization principles;
18. *Emphasizes* the urgent need to work towards a circular built environment by adopting building practices that minimize the use of raw materials to decrease emissions, by increasing the recovery rate of construction and demolition waste, and by improving the energy efficiency and extending the lifespan of existing buildings;
19. *Calls on* parliaments to integrate circular economy models into the national response to climate change, and invites them to ensure that climate change policies and strategies include measures to optimize the utility of products by maximizing their use and extending their lifespan, and enhance recycling (using waste as a resource), while promoting a circular design that reduces material consumption and uses lower-carbon alternatives;
20. *Invites* parliaments to support the adoption of sound environmental and social standards for the extractive industries, and of standards and policy frameworks that guarantee the sustainable recycling of secondary materials;

21. *Calls on* parliaments to promote digitalization and circular solutions, including circular procurement, circular design and services instead of products, as a means to develop a more resilient, and economically and environmentally sustainable travel and tourism industry,
22. *Requests* parliaments to ensure that governments invest in adequate digital infrastructure for internet coverage, connectivity and cybersecurity in order to enable the circular economy and ~~D4D~~ **digital development** to reach their full potential;
23. *Invites* parliaments to incentivize the implementation of circular business models with long-term benefits, such as changing consumer behaviour, stimulating innovation, and the scaling and diffusion of technologies;
24. *Calls on* parliaments to stimulate national and international networking and collaboration between schools and other relevant stakeholders (e.g. companies, NGOs and international organizations) to find digital solutions to challenges related to the circular economy, for example by encouraging co-creation through competitions and hackathons;
25. *Invites* parliaments to ensure that efforts to accelerate the transition to digitalization and the circular economy address potential risks, such as increasing material and energy use, increasing greenhouse gas emissions, deepening the digital gap among and within countries, and increasing the environmental footprint of the IT industry, as well as the transition's negative consequences in terms of security and human health;
26. *Calls on* the IPU to enhance cooperation with Member Parliaments and other organizations in order to gather evidence on the circular economy, environment and digitalization, to map the interplay between them and to promote guidelines for parliamentary action;
27. *Invites* parliaments to support the use of standardized, comparable and high-quality digital data which is properly mined, investigated and managed;
28. *Requests* parliaments to "de-ideologize" the discussion on data sharing by distinguishing between different types of data and to establish fair and functional data regulation based on common sense by securing fair access to data, as well as fair protection of data according to the ~~European Union's General Data Protection Regulation~~ **internationally accepted data protection principles**, intellectual property rights and other relevant legal frameworks;
29. *Encourages* parliaments and governments to engage in dialogue with stakeholders (e.g. civil society, companies and administrations) in order to increase their awareness of the importance of providing open data and turn them into active participants of the data economy and co-creators of knowledge when legally possible;
30. *Calls on* parliaments to envisage measures aimed at tackling people's lack of basic digital skills and e-literacy, and at increasing the number of IT, artificial intelligence, blockchain and other digital professionals, as a means to accelerate the digital transition;
31. *Invites* parliaments to exchange information and best practices and implement capacity-building programmes with a view to increasing awareness and knowledge among parliamentarians about the interplay between digitalization and the circular economy, and its potential in promoting a resilient and green recovery and achieving the SDGs, particularly responsible consumption and production.

LIPUTAN MEDIA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Fadli Zon Terpilih Jadi Biro Komisi Demokrasi dan HAM IPU

08-05-2021 / B.K.S.A.P.



Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. Foto: Ist/Man

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mendapat dukungan besar untuk mewakili Asia Pasifik Grup sebagai anggota Biro Komisi International Parliamentary Union (IPU) untuk Demokrasi dan HAM (IPU Bureau of the Standing Committee for Democracy and Human Rights). Jabatan tersebut akan diduduki Fadli selama periode 2021-2023.

Light

Pemilihan berlangsung dalam rangkaian "The 142nd IPU Assembly" yang diselenggarakan secara virtual pada Jumat (7/5/2021). Asia Pasifik Grup merupakan salah satu organisasi di bawah naungan organisasi IPU. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia untuk Pertemuan IPU ke-142 tersebut menunjukkan fokus DPR terhadap isu-isu demokrasi, HAM dan pemihakan pada kaum perempuan.

Menurut Fadli, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia berkepentingan erat untuk memajukan demokrasi, menghormati dan melindungi HAM termasuk hak-hak perempuan. "Kami merasa terhormat mendapatkan mandat untuk mewakili Asia Pasifik, kawasan yang kaya ragam budaya dan ideologi politik," ujar Fadli Zon usai pertemuan.

Pada kandidasi untuk Biro Komisi Demokrasi dan HAM, Grup Asia Pasifik harus mengisi dua posisi kosong dengan setidaknya satu posisi harus diisi anggota Parlemen laki-laki. Fadli Zon yang merupakan politisi Partai Gerindra itu perlu bersaing dengan sedikitnya dua kandidat lain yakni dari Australia (Mr. Julian Hill) dan Maladewa (Mrs. Jeehan Mahmoed).

Namun pada saat pertemuan, Australia menyatakan dukungan penuhnya kepada kandidasi Indonesia dan menarik pencalonannya. "Biodata Dr. Zon meyakinkan dan saya berharap dapat bertemu dengannya pada kesempatan lainnya. Saya meyakini Indonesia dapat menjalankan mandat dari Grup Asia Pasifik dengan baik," jelas Julian Hill dalam pertemuan itu.

Selain itu, Anggota BKSAP Putri Annetta Komaruddin, juga melenggang mulus mewakili Grup Asia Pasifik untuk duduk di Biro Parlemen Perempuan IPU (Bureau of IPU Women Parliamentarians). Grup Asia Pasifik menyatakan dukungan penuhnya kepada kandidasi Putri Komaruddin.

Politisi Partai Golkar yang juga duduk di Komisi XI DPR RI tersebut memiliki reputasi memadai untuk membahas beragam isu yang dekat dengan upaya pemihakan kaum Perempuan. "Ia perempuan dan berasal dari kaum muda. Ini kombinasi yang meyakinkan untuk membawa perspektif baru dalam isu-isu terkait perempuan di IPU," tambah Fadli Zon. **(ann/sf)**





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Terpilih Sebagai Anggota Biro Parlemen Perempuan IPU, Puteri Komarudin Tegaskan Pentingnya Peran Perempuan di Parlemen

08-05-2021 / B.K.S.A.P.



Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto: Dok/Man

Sebagai bagian dari rangkaian sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) atau organisasi parlemen dunia ke-142, Grup Asia Pasifik menyelenggarakan rapat daring guna menunjuk sejumlah perwakilan untuk menduduki posisi penting dalam badan-badan IPU, Jumat (7/5/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendapatkan dukungan penuh dari anggota Grup Asia Pasifik dalam keanggotaan Biro Parlemen Perempuan IPU (Bureau of Women Parliamentarians) untuk periode 2021-2025.

Light

“Merupakan suatu kehormatan bagi saya dan Indonesia untuk dapat mewakili Grup Asia Pasifik sebagai anggota Biro Parlemen Perempuan IPU ini. Mandat dan kepercayaan yang diberikan DPR RI serta dukungan penuh dari 36 parlemen negara yang tergabung dalam grup ini menunjukkan keberpihakan dan perhatian yang serius dari parlemen terhadap peran dan kesejahteraan perempuan,” ungkap Puteri dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/5/2021).

Sebagai informasi, Biro Parlemen Perempuan merupakan badan tetap pertama di IPU yang didirikan dengan tujuan untuk menjamin pengarusutamaan isu kesetaraan gender dan perempuan di parlemen. Biro tersebut terdiri atas sejumlah anggota parlemen perempuan dari berbagai perwakilan grup-grup geopolitik IPU, seperti Grup Asia Pasifik, Grup Afrika, Grup Arab, Grup Eurasia, Grup Amerika Latin/Karibia, dan Grup 12 Plus.

Puteri menegaskan bahwa keanggotaannya dalam Biro ini akan memperkuat posisi dan peran perempuan di kawasan Asia Pasifik. “Tentu saya akan bekerja semakin keras untuk memastikan bahwa perempuan di parlemen tidak hanya berperan sebagai perwakilan, tapi juga hadir dan aktif dalam membela kepentingan perempuan dalam pembangunan. Kami akan terus berupaya agar isu-isu perempuan Asia Pasifik juga mendapatkan tempat dan prioritas di kancah internasional demi kemajuan kawasan ini,” tutur Puteri.

Terpilihnya Puteri sebagai anggota Biro Parlemen Perempuan IPU tidak terlepas dari kiprahnya di parlemen maupun partai dalam menyuarakan isu-isu pemberdayaan ekonomi perempuan dan kepemudaan. Selain bertugas sebagai Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri juga mengemban amanah sebagai Ketua Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI – Parlemen Tiongkok, Ketua Kaukus Pemuda Parlemen, Koordinator Bidang Ekonomi Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), dan Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon juga dipercaya untuk menjadi anggota Biro Komisi IPU untuk Demokrasi dan HAM (Bureau of Standing Committee on Democracy and Human Rights) untuk periode 2021-2023.

“Keanggotaan saya dalam Komisi ini akan memperkuat perwakilan Asia Pasifik secara global. Berasal dari Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dan menjadi anggota dari grup geopolitik Asia Pasifik yang memiliki spektrum politik yang kaya, telah memberi saya konteks untuk menyelaraskan nilai universal demokrasi dan hak asasi manusia dengan nilai regional kita,” ungkap Fadli. (alw/sf)



© 2016 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.

Light



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Parlemen Indonesia Serukan Komitmen Akhiri Pandemi Lewat Pendekatan Multilateralisme

26-05-2021 / B.K.S.A.P.



Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sihar Sitorus, dalam Sidang Umum Persatuan Antar Parlemen (IPU) ke-142 secara virtual, Rabu (26/5/2021). Foto: Andri/Man

Pandemi Covid-19 menjadi momen tepat untuk mengatur ulang semua dimensi dalam kehidupan kita. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sihar Sitorus, dalam Sidang Umum Persatuan Antar Parlemen (IPU) ke-142, menyampaikan bahwa pandemi berpotensi membentuk sistem kesehatan dan ekonomi untuk lebih berkelanjutan, terlepas dari dampak yang ditimbulkan sangat menghancurkan.

Light

Penguatan persatuan, solidaritas, dan kerja sama global menjadi komponen penting bagi suatu negara untuk mengatasi pandemi dan supaya pulih lebih kuat. Pada forum dunia tersebut, Sihar menyebut Indonesia memiliki semangat nasional 'Gotong Royong' sebagai kunci dalam upaya pemulihan langsung dan jangka panjang dari pandemi Covid-19. Untuk itu, parlemen bertugas memastikan demokrasi dan kebebasan fundamental rakyat yang sejak merebaknya pandemi semakin tergerus.

"Sistem multilateral yang efektif dan inklusif dikombinasikan dengan kolaborasi global yang diperkuat untuk meningkatkan produksi dan distribusi yang tepat waktu dan adil serta diagnostik, terapeutik, dan vaksin yang aman dan efektif, adalah kunci untuk mengurangi pandemi Covid-19," kata Sihar kepada seluruh anggota parlemen dunia yang hadir dalam Sidang Umum IPU ke-142 secara virtual, Rabu (26/5/2021).

Politisi PDI-Perjuangan itu menyatakan, komitmen Indonesia terhadap pendekatan multilateralisme untuk mengakhiri pandemi ditunjukkan melalui Co-Chairmanship Indonesia dengan Kanada dan Ethiopia dalam COVAX AMC Engagement Group, yang bertujuan untuk menyediakan setidaknya 1,3 miliar dosis. Pernyataan tersebut sejalan dengan sesi debat interaktif yang bertemakan "Mengatasi Pandemi Hari Ini dan Membangun Hari Esok yang Lebih Baik: Melalui Peran Parlemen".

Investasi dalam pemulihan pandemi, lanjut Sihar, juga harus didasarkan pada penanganan masalah pada ketiga pilar penting, yakni ekonomi, masyarakat dan lingkungan. Terkait itu, Indonesia menyampaikan berkomitmen untuk mempercepat ekonomi hijau. Semata-mata sebagai katalisator pemulihan dari pandemi dengan berfokus pada pembangunan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam forum dunia tersebut, Parlemen Indonesia juga mendesak Persatuan Antar Parlemen (IPU) dan berbagai organisasi parlemen internasional lainnya untuk menjamin pemulihan pascasituasi yang memburuk di wilayah pendudukan Palestina. IPU perlu mengambil tindakan kolektif dan mendukung langkah berbagai pemimpin negara dan para anggota parlemen terkait penyelesaian konflik dengan menekankan kedamaian dan keadilan.

"Paling penting untuk memastikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, tenaga medis, awak media, warga sipil dan orang-orang tak berdosa yang menjadi sasaran selama konflik. Saat pandemi seperti sekarang, kita harus terus upayakan perdamaian, solidaritas dan kerja sama guna membangun masyarakat tangguh. Sebab tanpa perdamaian maka tidak ada pembangunan, tanpa pembangunan maka tidak ada perdamaian," pungkash Sihar.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Sosial Budaya dan OI Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri Penny Dewi Herasanti juga memandang perlu adanya delegasi internasional. Sebab pasca diumumkannya Light senjata antara Israel dan Palestina, 21 Mei lalu, tentu semua pihak mengharapkan perdamaian tersebut dapat

berlangsung lama. Terlebih, saat ini semua negara mengupayakan rekonstruksi dan pemulihan dari kerusakan yang ditimbulkan selama konflik berlangsung.

“Sebetulnya Pemerintah Indonesia sejak awal sudah mengusulkan adanya *international presence* di sana, sehingga gencatan senjata dapat diawasi, bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel dapat dicegah. Menteri Luar Negeri juga sering sampaikan, bagaimana caranya kita mencegah (tindakan) Israel tidak berulang, karena kejadian ini terus berulang, sehingga diperlukan adanya kehadiran internasional untuk mencegah hal tersebut,” kata Penny usai diskusi singkat bersama Anggota BKSAP DPR RI.

Terkait isu vaksin, Pemerintah Indonesia terus berupaya membuka jalur vaksin baik secara bilateral maupun multilateral. Perkembangan paling terbaru, Indonesia telah menjadi *co-sponsor* untuk TRIPS Waiver, atau pengecualian terhadap paten vaksin Covid-19, sehingga negara-negara lain dapat melakukan peningkatan produksi mengingat terbatasnya ketersediaan vaksin. Upaya tersebut telah ditempuh Presiden Indonesia yang juga mendesak negara-negara G20 untuk mendukung proposal tersebut.

“Jika negara-negara dapat meningkatkan produksi vaksin, tentu akan mempercepat pemenuhan kebutuhan vaksin secara global. Waiver TRIPS ini tentu proposalnya masih harus dinegosiasikan dan belum tahu kapan akan selesai, tapi perlu dukungan dari semua pihak. Yang paling penting, memastikan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, memiliki kapasitas sehingga ketika paten sudah dikecualikan maka kita bisa menarik manfaat dari adanya *waiver*, karena percuma di-*waive* kalau kita tidak punya kapasitas, makanya kita harus persiapkan itu,” pungkas Penny. (alw/sf)



© 2016 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.